

BAB III
ANALISIS FRAMING
HARIAN KOMPAS DAN KORAN TEMPO

Analisis pembingkaiian ini dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat oleh surat kabar *Kompas* dan *Koran Tempo* pada rentan waktu 10 – 23 Februari 2020 mengenai pembingkaiian berita pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Pemililihan pada rentan waktu tersebut dikarenakan pada bulan february, wacana pemulangan eks ISIS menjadi topik yang sangat krusial yang sedang dikaji oleh pemerintah untuk memutuskan antara memulangkan atau menolak eks ISIS kembali ke Indonesia.

Dalam penelitian ini, dari harian *Kompas* peneliti menemukan sekurangnya 10 berita dengan beberapa bentuk penulisan (*hardnews, features/softnews*, artikel opini dan tajuk rencana). Sementara *Koran Tempo* memuat sekurangnya 8 berita dalam format yang sama. Berita yang dipilih sebanyak delapan sample berita yang memiliki jurang sudut pandang pemberitaan yang paling lebar.

3.1 Analisis Framing Koran *Kompas*

3.1.1 Teks 1 : Pemerintah Tak Memulangkan

Teks ini merupakan berita yang ditampilkan oleh *Kompas* sehari setelah keputusan resmi terkait dengan penolakan pemulangan eks NIIS ke Indonesia. Berita ini berupa wawancara dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfudz MD setelah selesai menggelar rapat terbatas untuk membahas wacana

pemulangan eks NIIS ke Inodensia dan mengutip pernyataan dari tokoh nasional Ketua Umum PBNU yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat.

Tabel 3.1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Tak Memulangan
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk tidak memulangan teroris lintas batas Indonesia yang mendukung ISIS.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan Pemulangan eks ISIS ke Indonesia
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz MD (Menkopolkam) • KH. Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU) • Prof Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia)
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak ada rencana untuk memulangan teroris, bahkan memulangan FTF (<i>Forreign Teroris Fighter</i>) • Anak-anak yang mengikuti latihan militer dan bersmupah setia kepada NIIS sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia • Para pendukung NIIS yang kini ditahan di

		<p>Suriah dan Irak adalah pembuat gaduh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mereka (NIIS) memfitnah dan mengkhianati NKRI, diantaranya membakar paspor sebagai bukti kewarganegaraan
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pidato Jokowi di depan parlemen Australia mengenai politik identitas. Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, RI-Australia harus bekerja keras, bahu-membahu, berdiri tegak memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan, dan mencegah dunia dari ancaman <i>clash of civilization</i>.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan resmi pemerintah mengenai pemulangan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Bogor
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz MD (Menkopolhukam) • KH. Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU)
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mempertimbangkan rasa aman kepada rakyat Indonesia untuk melindungi warga negara dari ancaman teroris.
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak akan memulangkan eks NIIS karena sudah kehilangan kewarganegaraan

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan menampilkan keputusan dan alasan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS ke Indonesia.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Mahfudz MD usai rapat terbatas yang memutuskan untuk menolak eks NIIS

a. Struktur Sintaksis

Judul pada artikel ini telah memberikan gambaran secara jelas bahwa pemerintah tidak akan memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Kompas tidak menggunakan istilah ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*) namun menggunakan istilah NIIS (Negara Islam Irak Suriah) yang mudah dimengerti dengan bahasa Indonesia. Lead yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan alasan kuat dari pemerintah untuk tidak memulangkan eks ISIS, karena pemerintah ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kutipan yang diambil dalam artikel ini berasal dari para pemangku kebijakan dan tokoh nasional serta akademisi. Pertama, Menkopolhukam Mahfudz MD yang memberikan pernyataan resmi bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak akan memulangkan eks ISIS demi menjaga stabilitas keamanan negara. Kompas juga menyebutkan anggota yang mengikuti rapat terbatas untuk memutuskan kebijakan tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jendral (Pol) Idham Azis. Kedua, Kompas mengutip pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Prof.Hikmahanto Juwana yang mengatakan bahwa anak-anak eks ISIS yang telah menerima latihan militer tidak bisa dipulangkan karena telah terpapar oleh ideologi radikal, ia pun menambahkan jika pemerintah ingin memulangkan mereka, pemerintah harus benar-benar melakukan penyaringan secara ketat, karena mereka ditakutkan akan membangun jaringan baru di Indonesia. Ketiga, pernyataan langsung dari Ketua Umum PBNU KH.Said Agil Siradj yang menyatakan bahwa NU mendukung pemerintah dan menolak untuk memulangkan eks ISIS. Tokoh penting lain yang ditampilkan oleh Kompas adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudirini yang sebelumnya juga bertemu dengan Ketua Umum PBNU untuk memberikan pertimbangan. Menurut KH. Said Agil eks ISIS tidak berhak dipulangkan karena dianggap membuat kegaduhan didalam negeri.

Di bagian penutup, Kompas menampilkan Presiden Jokowi saat memberikan pidato didepan parlemen Australia untuk mengajak bersama-sama memerangi politik identitas yang dapat merusak kemajemukan negara, mengingat RI-Australia merupakan negara yang memiliki kemajemukan beragam. Dilihat secara keseluruhan dalam artikel ini, Kompas ingin menunjukkan bahwa keputusan pemerintah yang tidak memulangkan eks ISIS sudah tepat, hal ini dapat dilihat pada kutipan dari berbagai tokoh yang mendukung pemerintah dengan alasan yang rasional serta peran tokoh tersebut di dalam masyarakat.

b. Struktur Skrip

Dalam Stuktur Skrip, Kompas memenuhi unsur yang lengkap 5W dan 1H. Penonjolan yang ditampilkan dalam artikel ini berupa unsur *who*, yaitu Menkopolhukam dan Ketua Umum PBNU. Kedua tokoh tersebut memiliki

pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Selain itu, alasan dalam unsur *why* ditunjukkan dengan alasan pemerintah yang ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga dalam unsur *how*, pemerintah memberikan keputusan resmi untuk tidak memulangkan eks NIIS karena dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, Kompas ingin menunjukkan dukungan kepada pemerintah dengan keputusan untuk tidak memulangkan eks NIIS ke Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam struktur sintaksis yang menampilkan beberapa tokoh penting yang berpengaruh di dalam masyarakat. Dalam artikel ini, Kompas memiliki satu tema yang cukup besar yaitu alasan dari berbagai tokoh yang dapat mempengaruhi masyarakat yang mendukung keputusan pemerintah. Pertama Menkopolhukam Mahfudz MD yang secara resmi memberikan pernyataan tersebut selaku tokoh yang memiliki kewenangan besar terkait dengan kebijakan tersebut. Kedua, Ketua Umum PBNU KH.Said Agil Siradj, dalam struktur sosial masyarakat, NU (Nahdatul Ulama) merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sehingga pernyataan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Pengrus Besar NU secara otomatis akan mempengaruhi pengikutnya, secara tidak langsung pernyataan tersebut mewakili seluruh anggota NU di Indonesia. Ketiga, Kompas juga mengutip pernyataan dari Guru Besar Prof.Hikmahanto yang menjadi akademisi di salah satu Universitas terbaik di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, secara akademis pernyataan tersebut merupakan alasan yang cukup rasional untuk dijadikan pijakan kebijakan pemerintah. Keseluruhan dalam artikel ini, secara jelas

menjelaskan bahwa penolakan pemulangan eks NIIS memiliki alasan yang rasional, sehingga pemerintah telah mempertimbangkan untuk menjaga persatuan dan keamanan masyarakat.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, sudah dapat dijelaskan bahwa Kompas mendukung kebijakan pemerintah untuk menolak eks NIIS kembali ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penulisan eks NIIS yang secara keseluruhan digambarkan sebagai FTF (*Foreign Terroris Fighter*). Kompas memberikan gambaran bahwa seluruh eks NIIS yang berjumlah 689 merupakan FTF sehingga tidak layak untuk dipulangkan. Selain itu, kutipan dari Ketua Umum PBNU KH. Said Agil Siradj yang mengutip dari kitab suci Umat Muslim Al-Qur'an " *Dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengusir para pembuat kegaduhan. Orang buat gaduh, usir dari Madinah, jangan sampai mengganggu*" secara tidak langsung telah menggambarkan dalam sisi agama adalah sah hukumnya untuk tidak menerima kelompok yang membuat kegaduhan dalam sebuah kota, eks NIIS digambarkan sebagai kelompok yang dapat membuat kegaduhan didalam negeri. Sehingga penolakan pemulangan eks ISIS telah sah dalam kacamata hukum dan agama. Gambar yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan foto dari Menkopolkukan Mahfudz MD usai menghadiri rapat dan memberikan pernyataan resmi dari pemerintah untuk tidak memulangkan eks ISIS ke Indonesia.

3.1.2 Teks 2 : Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi

Teks ini merupakan berita yang menampilkan kewasapaan pemerintah untuk mengawasi batas negara agar teroris lintas batas tidak dapat masuk ke Indonesia. Berita ini juga menampilkan pendapat lain terkait dengan wacana pemulangan eks NIS yang dikutip dari salah satu tokoh nasional Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Tabel 2.2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tak mau kebobolan kepulangan para teroris lintas batas lewat jalur mandiri atau ilegal. Untuk itu, verifikasi perlu dilakukan secara rinci dan valid.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terkait dengan jalur kepulangan teroris lintas batas
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) • Mahfudz MD (Menkopolkam) • Abdul Mu'ti (Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Para teroris lintas batas semestinya bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri pergi ke Suriah dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia • FTF yang mencoba masuk ke Indonesia melalui jalur gelap akan ditangkap

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua eks NIIS dapat dipulangkan
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • WNI yang masih setia kepada pancasila dapat dipulangkan namun WN yang sudah berhianat kepada pancasila tidak layak untuk dipulangkan.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan jalur kepulauan teroris
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Agar pemerintah tidak kebobolan menerima FTF masuk ke dalam negeri
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus melakukan pendataan dan penyaringan terkait dengan kebijakan pemulangan eks NIIS ke Indonesia.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan merupakan antisipasi bagi para teroris termasuk eks NIIS jika ada yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudirini dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah saat melakukan rapat tertutup terkait dengan kebijakan pemerintah.

a. Struktur Sintaksis

Judul dan lead pada artikel ini menampilkan antisipasi pemerintah terkait dengan indikasi kepulauan para teroris melalui jalur ilegal. Lead yang ditampilkan berupa upaya pemerintah untuk melakukan verifikasi atau penyaringan bagi siapa saja yang akan memasuki wilayah Indonesia. Latar informasi mengenai artikel ini

merupakan lanjutan dari keputusan pemerintah untuk menolak kepulangan eks ISIS ke Indonesia karena hampir seluruhnya dianggap sebagai FTF oleh pemerintah. Kutipan yang diambil dalam artikel ini berupa pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa, seharusnya pada eks NIIS bertanggung jawab dengan keputusannya saat meninggalkan Indonesia dan pergi ke Suriah karena menurut Presiden mereka telah kehilangan kewarganegaraanya. Selain itu, pernyataan lain yang dikutip oleh Kompas berasal dari Menkopolkam Mahfudz MD yang akan menindak tegas teroris yang masuk ke Indonesia melalui jalan ilegal, menurutnya jumlah eks NIIS yang diperkirakan mencapai 689 merupakan FTF termasuk ana-anak, namun Mahfudz berpendapat tidak semua anak-anak telah terpapar radikalisme, pemerintah belum memiliki upaya untuk menyaring mereka.

Melalui pernyataan Mahfudz MD, pemerintah belum memiliki mekanisme yang jelas terkait dengan verifikasi terhadap warga eks ISIS. sehingga, Kompas menampilkan sudut pandang yang lain dari salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar yaitu Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Mu'ti memberikan pernyataan bahwa pemerintah harus segera melakukan verifikasi terkait engan eks NIIS yang berada di luar negeri. Bahkan Mu'ti juga memberikan usulan untuk memulankan eks NIIS, namun tidak semua dipulangkan. Di bagian penutup, Kompas menampilkan pernyataan Mu'ti yang mengatakan ada beberapa eks NIIS yang masih menghormati pancasila dan ada yang telah berhianat.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini memenuhi kriteria unsur yang lengkap berupa 5W dan 1 H. penonjolan unsur dalam artikel ini terlihat pada who yaitu narasumber i Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul M'ti. Selain itu, penekanan unsur how juga ditampilkan secara rinci, yaitu pemerintah harus melakukan verifikasi data terkait dengan eks NIIS melalui pernyataan Abdul Mu'ti, menurutnya terdapat beberapa jenis eks NIIS yang perlu didata oleh pemerintah karena tidak semua eks NIIS merupakan kombatan ada beberapa diantaranya yang menjadi korban dari ideologi radikal. Melalui verifikasi pemerintah dapat mengantisipasi adanya kepulangan secara ilegal yang dilakukan oleh para teroris.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini memiliki dua tema besar yang ingin ditunjukkan oleh Kompas. Pertama, pemerintah secara resmi telah menolak untuk memulihkan eks ISIS dan pemerintah menyiapkan antisipasi mereka untuk pulang ke Indonesia melalui jalur mandiri atau ilegal, hal ini dikarenakan pemerintah tidak mau kebobolan menerima mereka masuk kedalam negeri. Kedua, meski pemerintah akan menindak tegas para teroris yang akan masuk ke Indonesia, namun pemerintah belum memiliki mekanisme resmi yang harus dijalankan untuk mengidentifikasi eks ISIS.

Untuk itu, Kompas menampilkan pernyataan Sekreteris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang memberikan usulan mengenai tiga jenis eks ISIS yang harus diidentifikasi. Pertama, mereka yang ke Suriah dan menjadi kombatan secara

ideologis. Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis akibat iming-iming ekonomi dan tak memiliki ideologi yang kuat. Dan ketiga, mereka yang hanya ikut-ikutan dan tertipu oleh teman atau saudara. Menurut Mu'ti pemerintah perlu mengkaji identifikasi tersebut, karena diantara mereka ada beberapa yang menjadi korban kekerasan dan layak untuk dipulangkan.

d. Struktur Retoris

Secara retoris artikel ini memberikan gambaran bahwa Kompas memberikan pendapat yang lain dari tokoh penting terkait dengan isu pemulangan eks ISIS. Pendapat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sehingga pernyataan yang keluar dari salah satu pengurus menjadi rujukan dari anggota Muhammadiyah. Kompas memberikan *highlight* pada artikel ini berupa **Tidak semua dipulangkan** yang artinya Kompas menyetujui pernyataan tersebut namun secara implisit Kompas masih mendukung penolakan pemulangan eks NIIS ke Indonesia. Gambar yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudirini dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah saat melakukan rapat tertutup terkait dengan kebijakan pemerintah yang membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan isu keagamaan.

3.1.3 Teks 3 : Langkah Tegas Pemerintah Sikapi NIIS

Teks ini merupakan tajuk rencana yang ditulis oleh editorial Kompas yang mendukung keputusan pemerintah terkait dengan penolakan pemuangan eks NIIS

ke Indonesia. Keputusan pemerintah selaras dengan pembedingkaian Kompas sejak wacana pemulangan eks NIIS menjadi perdebatan krusial di dalam masyarakat.

Tabel 3.3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Tajuk Rencana	<ul style="list-style-type: none"> Langkah Tegas Pemerintah Sikapi NIIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan orang-orang asal Indonesia yang dianggap terlibat bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan resmi pemerintah menolak memulangkan eks NIIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan pemerintah menunjukkan sinyal kuat kepada seluruh elemen bangsa.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan telah diambil. Berikutnya, langkah yang dilandasi prinsip kemanusiaan dan hati-hati perlu dilakukan secara terpadu dalam melihat satu per satu kasus.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan resmi pemerintah menolak memulangkan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> 13 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> Editorial Kompas
	Why	<ul style="list-style-type: none"> Kompas mendukung langkah tegas pemerintah
	How	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan merupakan bentuk dukungan dari Kompas menyikapi keputusan pemerintah yang tepat untuk menolak memulangkan eks NIIS
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Kompas memberikan dukungan atas keputusan pemerintah melalui alasan rasional yang ditulis oleh Kompas di Tajuk Rencana, terdapat kata “Langkah tegas” diawal kalimat paragraf pertama.

a. Struktur Sintaksis

Artikel ini merupakan tajuk rencana yang ditulis oleh editorial Kompas yang terbit pada tanggal 13 Februari 2020, selang satu hari paska keputusan resmi dari pemerintah yang menolak kepulangan eks ISIS ke Indonesia. Judul dan lead para artike ini menunjukkan bahwa Kompas sangat mendukung keputusan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari editorial bahwa penolakan pemulangan eks ISIS tidak melanggar aturan sesuai dengan UU kewarganegaraan yang tidak mengecualikan kondisi apapun. Selain UU kewarganegaraan, Kompas juga menampilkan UUD 1945 terkait dengan kesetiaan dengan negara. siapapun yang melepas kesetiaan pada negara maka secara otomatis akan kehilangan kewarganegaraanya. Menurut Kompas, keputusan pemerintah ini menunjukkan sinyal kuat kepada elemen bangsa bahwa pemerintah bertindak tegas untuk menjaga keamanan nasional. Dibagian penutup, Kompas menampilkan langkah pemerintah yang harus dilakukan setelah mengesahkan keputusan resminya yaitu

pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi langkah pengambilan keputusan yang menyangkut soal kemanusiaan.

b. Struktur Skrip

Artikel ini tidak memiliki struktur skrip yang lengkap, karena artikel berupa tajuk rencana yang merupakan opini dari editorial Kompas. Unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini adalah alasan Kompas memberikan dukungan kepada pemerintah terkait dengan keputusan resmi untuk tidak memulangkan eks NIIS.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, Kompas mengapresiasi langkah pemerintah menolak pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Kompas menampilkan alasan yang kuat dengan mengutip UU kewarganegaraan dan Uud 1945 tentang kesetiaan pada negara. Secara eksplisit, Kompas menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah merupakan keputusan yang tepat. Karena, pemerintah lebih mementingkan untuk menjaga keamanan nasional dibandingkan memulangkan orang-orang yang dapat mengancam keselamatan warga negara. Kompas menampilkan dua garis besar dari keputusan pemerintah; pertama pemerintah tegas menolak terorisme dalam berbagai bentuk. Kedua, menjunjung tinggi status kewarganegaraan. Melalui tajuk rencana ini, Kompas mengajak pembaca untuk menyikapi bahwa segala bentuk yang mengarah kepada terorisme adalah bahaya, termasuk memulangkan eks NIIS.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, dapat dilihat bahwa Kompas memberikan dukungan kepada pemerintah yang menolak memulangkan eks NIIS ke Indonesia. Hal ini dapat

dilihat secara jelas melalui struktur sintaksis dari judul dan juga lead yang ditulis. Melalui paragraf pertama, Kompas telah menunjukkan dukungannya dengan kaimat "*Langkah tegas*" yang digambarkan sebagai tindakan yang tepat dan benar. Kompas juga ikut memberikan penjelasan sangat rasional dari keputusan tersebut. Yakni, pemerintah tidak melupakan sisi kemanusiaan dengan memberikan pertimbangan untuk memulangkan anak-anak dibawah usia 10 tahun dan anak yatim piatu yang terjebak di kamp-kamp Suriah. Hal ini selaras dengan yang sering digaungkan oleh masyarakat yang meminta pemerintah memulangkan eks NIIS, sehingga keputusan tersebut dianggap telah benar-benar sesuai dengan konteksnya. Dari sisi keamanan, pemerintah mendengarkan masyarakat yang tidak menginginkan mereka pulang karena ditakutkan akan menjadi virus teroris baru, sedangkan dari sisi kemanusiaan pemerintah masih memberikan kesempatan bagi warga negaranya khususnya anak-anak untuk dipulangkan ke Indonesia. Secara eksplisit, Kompas telah memberikan dukungan yang jelas kepada pemerintah untuk menolak memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

3.1.4 Teks 4 : Menolak Kombat ISIS

Teks ini merupakan artikel yang dimuat dalam kolom opini Kompas yang memberikan pernyataan serta alasan mengapa masyarakat perlu mendukung pemerintah untuk menolak memulangkan eks NIIS. Penulis merupakan salah satu tokoh ormas Islam yaitu Sekretaris Jendral PBNU yang berperan penting untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Tabel 3.4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak Kombatant ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Riuh perdebatan soal wacana pemulangan kombatant Negara Islam Irak Suriah (NIIS) ke Tanah Air menguras nergi kita
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana pemulangan eks NIIS ke Indonesia
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Jack Synder (Guru Besar Universitas Columbia) • Karen Amstrong (Buku The Battle of God) • KH.Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU)
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Nahdatul Ulama (NU) menolak paham radikalisme termasuk NIIS dan menolak memulangkan mereka • Eks NIIS telah kehilangan kewarganegaraan • Eks NIIS adalah kelompok yang dapat mengancam kemanan
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak kerusakan lebih uatama dibandingkan mendatangkan kemaslahatan (masalah)
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak Eks NIIS pulang ke Indonesia
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • ISIS adalah salah satu paham radikalisme yang

		dapat membayarkan masyarakat
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan UU kewarganegaraan UU 12 tahun 2006 (secara legal) • Pendekatan keagamaan yang mengerucut pada penolakan membayarkan menurut dalil Al-Quran
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan artikel merupakan gagasan dan alasan untuk menolak pemulangan eks NIIS ke Indonesia
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dalil atau ayat Al-Quran Al-Ahzab: 60 sebagai penguat argumen penolakan. • Menggunakan pendekatan Ushul-fiqh dengan mengutip salah satu kaidah

a. Struktur Sintaksis

Judul yang ditampilkan dalam artikel ini telah menggambarkan penolakan secara eksplisit terkait dengan penolakan eks NIIS ke Indonesia. *Lead* yang ditampilkan merupakan gambaran bagaimana masyarakat Indonesia selama ini telah memikirkan sesuatu yang telah menguras energi dan pikiran. Latar informasi dalam artikel ini yaitu menanggapi wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia yang saat itu menjadi perbincangan publik yang cukup ramai. Tidak ada pernyataan yang ditampilkan dalam artikel ini. Namun penulis artikel menggunakan kajian teoritis dan mengutip dari kajian ilmiah dalam memberikan pandangan untuk menolak eks NIIS kembali ke Indonesia. Kajian ilmiah yang ditulis merujuk pada peristiwa sejarah tentang radikalisme dalam sebuah negara demokrasi yang ditulis oleh Jack

Synder Guru Besar Universitas Columbia New York. Penulis juga menggunakan konsep pemikiran Karen Amstrong tentang fanatisme agama yang dapat menimbulkan kekerasan.

Penulis mengungkapkan alasan dalam pernyataan yang tertuang dalam opini pada artikel ini yaitu secara tegas menolak untuk memulangkan eks NIIS ke Indonesia. Menurutnya, eks NIIS telah kehilangan status kewarganegaraanya setelah meninggalkan Indonesia dan saat bergabung dengan NIIS. Pernyataan tersebut mengutip dari dasar hukum UU tentang kewarganeraan. Selain itu, menurut penulis, NIIS merupakan kelompok yang berbahaya dan sering menimbulkan kegaduhan di dalam negeri, sehingga porsinya untuk dikembalikan ke Indonesia sangat tidak dianjurkan. Negara berhak melindungi keamanan masyarakat, menolak memulangkan eks NIIS yang dapat mengancam masyarakat adalah sebuah tindakan yang telah tepat. Dibagian penutup, penulis menampilkan kaidah pendekatan yang digunakan oleh para ulama klasik saat dihadapkan dalam pengambilan keputusan. Penulis mengutip salah satu kaidah yang menjadi alasan kuat mengapa ia menolak untuk memulangkan eks ISIS.

b. Struktur Skrip

Artikel ini merupakan opini dari penulis lepas yang dimuat oleh Kompas pada 13 Februari 2020. Penulis merupakan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PNBU) A Helmy Faishal Zaini yang memberikan tanggapan tentang wacana pemulangan eks ISIS yang beredar di masyarakat. Secara skrip artikel ini tidak memenuhi kelengkapan 5W dan 1 H, karena teks berupa artikel opini yang merupakan bentuk gagasan. Unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini berupa

unsur *why* dan *how*. Dalam unsur *why*, secara tegas penulis memberikan pernyataan bahwa eks NIIS adalah kelompok yang berpotensi membahayakan masyarakat berkat ideologi radikalnya yang pernah menetap dipikirannya. Sedangkan dalam unsur *how* penulis mengutip dari UU kewarganegaraan dan salah satu ayat yang Kitab suci agama Islam untuk memberikan alasan secara rasional, mengapa Indonesia harus menolak eks NIIS kembali.

c. Struktur Tematik

Artikel ini telah menggambarkan secara tematik dalam memberikan pernyataan terkait dengan penolakan eks NIIS ke Indonesia. Kompas memberikan ruang bagi penulis yang memiliki gagasan dan alasan yang rasional untuk menolak pemulangan eks NIIS. Penulis artikel merupakan Sekretaris Jendral PBNU, sementara NU adalah salah satu organisasi masyarakat yang besar di Indonesia. Pemilihan artikel tersebut memberi alasan kepada publik, bahwa NU yang merupakan pioner dalam mengambil langkah kebijakan berdasarkan pendekatan keagamaan telah menolak wacana pemulangan eks NIIS ke Indonesia, sehingga alasan masyarakat yang menolak untuk memulangkan eks NIIS menjadi semakin kuat.

Terdapat tema besar yang ditampilkan dalam artikel ini. Pertama, pengutipan dari sumber ilmiah menjadi rujukan kuat penulis dalam menguatkan pendapat. Kutipan dari Karen srong yang menyatakan bahwa setiap agama memiliki fanatisme fundamentalis yang dapat menimbulkan kekerasan. Kutipan yang lain berasal dari KH.Said Agil Siradj yang merupakan Ketua Umum PBNU, menurutnya radikalisme saat ini terbagi menjadi tiga bentuk varia. Pertama, radikalisme puritan

yaitu radikalisme yang ingin melakukan pemurnian agama dari budaya loka. Kedua, radikalisme sekuler yaitu radikalisme yang ingin mengislamkan segala sistem sekuler seperti demokrasi, sistem politik dan negara. Dan ketiga, radikalisme teroris yaitu yang mengejawantahkan konsep dan pemikirannya dengan cara pemaksaan dengan menggunakan kekerasan. Dari kutipan ini, terlihat bahwa penulis mendefinisikan kadar radikalisme yang sangat berbahaya jika dibiarkan, karena dapat mengancam masyarakat bahkan negara.

Tema yang kedua berupa pendekatan yang rasional untuk menolak pemulangan eks NIIS. Pertama, penulis menampilkan UU kewarganegaraan pasal 23 UU No 12 Tahun 2005 yang menjadi pijakan utama dalam menolak pemulangan eks NIIS. Penulis menampilkan secara eksplisit bahwa eks NIIS secara sengaja telah meninggalkan identitas mereka sebagai WNI untuk berpindah kewarganegaraan, sehingga tidak ada kewajiban bagi negara untuk membawa mereka kembali. Kedua, penulis menggunakan metode pemikiran ala pesantren yang mengutip dari Kitab Suci agama Islam Al-Qur'an Al-ahzab ayat 60, inti dari ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk mengusir orang-orang yang membuat kegaduhan didalam kota. Langkah ini dipandang dan disamaratakan dengan NIIS, bahwa mereka merupakan kelompok yang membuat kegaduhan dan keonaran sehingga, pemerintah berhak untuk mengusir mereka dari negara. Selain mengutip dari Kitab suci, penulis juga menggunakan kaidah *Ushul-Fiqh* yang merupakan kaidah dasar bagi para ulama klasik yang hendak memutuskan suatu kebijakan. Penulis menggunakan kaidah "*menolak kerusakan lebih didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan mendatangkan masalah*". Kaidah tersebut menjadi tolak

ukur selanjutnya bagi pemerintah untuk menolak memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

Berdasarkan isi dalam artikel ini, Kompas seolah ingin menunjukkan bahwa memulangkan eks NIIS ke Indonesia sama sekali tidak menentang aspek keagamaan. Pengutipan sumber dengan pendekatan agama memperlihatkan bahwa umat Islam yang menjadi pijakan dari munculnya NIIS ikut menolak memulangkan mereka.

d. Struktur Retoris

Pengutipan kitab suci Al-Quran dan qaidah *Ushul Fiqh* menjadi tolak ukur penting untuk mempengaruhi masyarakat, bahwa menolak memulangkan eks NIIS memiliki landasan rasional dalam agama, terutama agama Islam. Penampilan ayat Al-Quran dikutip secara jelas dalam artikel ini dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat dapat membaca secara jelas.

“Sesungguhnya, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar”. Dari ayat tersebut, penulis menyandingkan eks NIIS sebagai tetangga yang tidak baik dan sering menyakiti tetangga yang lainnya, sehingga mengusir mereka dari sebuah kota atau negara menjadi sah hukumnya. Selain itu, penulis juga mengutip dari qaidah Ushul Fiqh atau hukum dasar dalam pengambilan keputusan yang sering digunakan oleh ulama klasik ditulis menggunakan tulisan latin bahasa

arab beserta dengan terjemahannya, “*dar’ul mafsid muqaddamun al jabil mashlih*” (menolak kerusakan lebih didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan mendatangkan masalah). Dari qaidah tersebut, penulis menggambarkan bahwa eks NIIS akan membawa kerusakan, sehingga menolak kerusakan lebih baik dibandingkan membuat masalah yang banyak.

Melihat artikel yang ditampilkan dalam kolom opini Kompas, secara retorik dan eksplisit, Kompas menunjukkan bahwa tidak memulangkan eks NIIS adalah sebuah keputusan yang tepat yang tidak hanya berlandaskan pada hukum negara saja tetapi juga sah dalam hukum agama.

1.1.5 Teks 5 : Bahaya Pemulangan Eks NIIS

Teks ini merupakan artikel bebas yang ditampilkan oleh Kompas di kolom opini. Penulis merupakan pengamat Terorisme yang memberikan pandangan serta contoh kasus terkait dengan ancaman bahaya jika eks NIIS dipulangkan ke Indonesia. Artikel ini banyak memberikan contoh kasus atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan juga korban dari tindakan teroris di Indonesia.

Tabel 3.5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Bahaya Pemulangan Eks NIIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Gelombang penolakan masyarakat terhadap fenomena WNI eks Negara Islam Irak dan Suriah yang minta pulang ke Indonesia begitu kuat. Pemerintah

		sendiri telah memutuskan tak akan memulangkan kombatan NIIS demi keamanan 260 juta rakyat di Tanah Air.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan pemulangan eks NIIS ke Indonesia
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia memiliki banyak kelompok yang berafiliasi dengan NIIS (JAD, JAK dan MIT) • Memulangkan eks NIIS akan menambah amunisi baru bagi anggota terorisme di Indonesia • Sejumlah eks NIIS yang telah mengikuti rehabilitasi masih memegang teguh prinsip ideologi radikal • Orang-orang yang pergi ke Suriah dan ikut berperang bersama NIIS dianggap sebagai pahlawan dan figur yang dihormati
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah cukup sibuk menghadapi kelompok teroris di Indonesia, memulangkan eks NIIS akan menambah beban bagi pemerintah.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan pemulangan eks ISIS ke Indonesia
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Dete Aliah (Pengamat Terorisme)
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Eks NIIS sangat berbahaya dan

		mengancam keamanan Indonesia
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada eks NIIS yang akan dipulangkan harus melalui asesmen yang ketat dari pemerintah.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan artikel ini menampilkan contoh kasus dari orang-orang yang pernah bergabung dengan NIIS dan menjadi kelompok teror yang mengancam kewanman masyarakat.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • NIIS hanya percaya pada UU Tuhan dan menganggap negara sebagai sistem buatan manusia yang melanggar norma agama.

a. Struktur Sintaksis

Secara sintaksis judul dan *lead* pada artikel ini telah menggambarkan narasi tentang ancaman bahaya dari eks NIIS jika diperbolehkan kembali ke Indonesia. Latar informasi artikel ini merupakan tanggapan dari pengamat terorisme tentang wacana pemulangan eks NIIS ke Indonesia. Sesuai dengan keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan eks NIIS, artikel ini menambahkan kelengkapan dari berbagai alasan mengapa pemerintah menolak untuk menerima mereka kembali. Tidak ada kutipan sumber yang ditampilkan dalam artikel ini, penulis justru memberikan kasus contoh yang konkrit untuk menguatkan dukungan kepada pemerintah.

Penulis artikel menampilkan kelompok terorisme di Indonesia cukup beragam dan rata-rata memiliki afiliasi dengan NIIS. Menurutnya, jika pemerintah memulangkan

mereka maka akan memunculkan kelompok teroris baru yang sangat kuat. Melalui narasi ini, penulis mengajak agar masyarakat memahami bahayanya kelompok tersebut jika pemerintah memberikan peluang untuk memulangkan mereka. Artikel ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang dapat menjadi alasan rasional untuk mendukung pemerintah. Kasus yang ditampilkan merupakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh para deportan atau kelompok NIIS yang dideportase dari negara asing untuk bergabung dengan NIIS dan dikembalikan ke Indonesia. Selain itu, penulis juga menampilkan korban terorisme yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Melalui narasi tersebut, penulis ingin mengajak pembaca memahami betapa bahayanya kelompok teroris. Diketahui NIIS merupakan jaringan kelompok teroris yang banyak membuat teror di Indonesia. Dibagian penutup penutup, narasi yang ditampilkan berupa pemerintah saat ini telah kewalahan menghadapi kelompok terorisme yang masih menjadi sel-sel aktif, jika eks NIIS dipulangkan maka akan menambah beban pemerintah untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. Melalui artikel ini, Kompas ingin menunjukkan bahwa penolakan pemerintah untuk tidak memulangkan eks NIIS memiliki pertimbangan yang cukup matang.

b. Struktur Skrip

Artikel ini tidak memiliki struktur skrip yang lengkap, karena berupa opini yang ditulis oleh penulis lepas di kolom opini Kompas. Unsur struktur skrip yang ditonjolkan pada artikel ini berada di unsur *why* yaitu mengapa pemerintah menolak eks NIIS yang menginginkan pulang ke Indonesia. Unsur tersebut ditunjukkan melalui penonjolan pada contoh kasus teror yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari

kasus gereja di Samarinda hingga Surabaya, serta alasan lain seperti fundamentalisme fanatisme ideologi radikal yang tidak mudah untuk dihilangkan meski telah melalui program deradikalisasi.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai ancaman bahaya jika pemerintah memulangkan eks NIIS ke Indonesia. Ancaman tersebut ditampilkan melalui pernyataan dan contoh kasus yang ditulis oleh Dede Aliah seorang pengamat teroris. Sisi ancaman bahaya telah ditampilkan oleh penulis sejak paragraf awal. Penulis memberikan gambaran dengan menampilkan korban teroris yang telah berasal dari berbagai kalangan, mulai dari seorang balita di Samarinda hingga pembantaian kepada mako brimob melalui video yang menyebar di masyarakat. Berangkat melalui pernyataan tersebut, penulis menampilkan kelompok-kelompok radikal yang berafiliasi dengan NIIS seperti *Jamaah Ansor Daulah*, *Jamaah Ansor Khilafah* dan *Mujahidin Indonesia Timur* yang mungkin akan menarik para eks NIIS untuk bergabung dengan mereka. Ditambah fatwa yang dikeluarkan oleh NIIS yang mengizinkan para pengikutnya untuk melakukan aksi serangan di negara masing-masing jika berhalangan untuk datang ke Suriah.

Selain menampilkan dari sisi korban, penulis juga memberikan gambaran atau prediksi tentang hal apa saja yang terjadi eks NIIS dipulangkan, penggambaran tersebut tidak hanya merupakan prediksi saja tetapi disertai dengan contoh kasus yang terjadi sebelumnya. Pertama, mengenai para deportan, penulis menggambarkan bahwa para deportan dari NIIS yang dipulangkan ke Indonesia tidak semuanya pulih, bahkan diantaranya menjadi semakin radikal. Diantara eks

NIIS yang pernah direhabilitasi merupakan salah satu yang bertanggungjawab atas teror bom gereja di Surabaya. Ideologi yang mereka anut semakin kuat bahwa mereka lebih meyakini aturan tuhan atau disebut sebagai UU Tuhan yang sudah tertulis didalam kitab suci dibandingkan dengan UU yang dibuat oleh manusia seperti sistem pemerintahan dan hukum yang saat ini berjalan di negara.

Penulis juga menampilkan kelompok eks NIIS yang berhasil pulang ke Indonesia melalui jalur mandiri, sehingga pemerintah perlu waspada untuk meningkatkan keamanan terkait dengan jalur masuk para eks NIIS yang kembali ke Indonesia. Pernyataan ini juga dibarengi dengan contoh kasus yang terjadi. Melalui artikel ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memulangkan eks NIIS memiliki resiko yang cukup besar. Menurutnya, Indonesia memiliki organisasi-organisasi kecil yang mendambakan khilafah menjadi sistem tatanan pemerintah, sehingga jika mereka dipulangkan dan bersatu dengan kelompok tersebut akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar kepada pemerintah.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, artikel ini ingin menyampaikan bahwa pemulangan eks NIIS sangat beresiko jika pemerintah tidak mempertimbangkannya secara benar. Penolakan pemerintah terkait dengan pemulangan mereka sudah dianggap tepat, karena ancaman yang ditimbulkan cukup berbahaya. Tanpa memiliki kebijakan untuk menolak mereka, beberapa diantaranya telah mendapatkan akses untuk pulang secara mandiri dan melakukan aksi teror didalam negeri. Sehingga, penolakan pemerintah cukup berasalan secara rasional. Artikel ini banyak menampilkan contoh kasus tindakan teror yang memberikan pengaruh cukup besar. Penulis juga

mengutip fatwa yang dipegang oleh setiap anggota NIIS dan ditunjukkan kepada khalayak agar mereka mengetahui betapa bahanya NIIS. Kutipan tersebut berbunyi *“bila kalian tidak bisa berjihad ke Suriah karena aturan yang membuat kalian tidak bisa berhijrah ke Suriah, maka lakukanlah jihad di negara kalian masing-masing”*. Melalui kutipan tersebut dan contoh kasus yang ditampilkan, artikel ini menjadi salah satu rujukan yang kuat untuk menelaah alasan yang kuat dari keputusan resmi pemerintah untuk menolak eks NIIS kembali ke Indonesia.

Melalui artikel ini, Kompas ingin menunjukkan bahwa eks NIIS merupakan ancaman yang cukup besar. Sehingga, kebijakan untuk menolak mereka sangat tepat. Narasi yang ditampilkan dalam kolom opini Kompas ini secara eksplisit menggambarkan bahwa Kompas menolak memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

1.1.6 Teks 6 : Lindungi Negara dari Terorisme

Teks yang ditampilkan merupakan tulisan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas melalui jaja pendapat. Hasil laporan yang disajikan berupa infografik yang memberikan gambaran prosentase tentang pendapat masyarakat terkait dengan wacana pemulangan eks NIIS ke Indonesia. Selain infografik, Kompas juga menyajikan laporan tertulis yang memberikan penjelasan secara lebih detail dari hasil temuan yang ditampilkan secara numerik melalui grafik.

Tabel 3.6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Lindungi Negara dari Terorisme

	Lead	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks anggota NIIS dinilai masuk akal di tengah trauma publik terhadap ancaman terorisme. Mengurangi potensi terorisme lebih menonjol sebagai alasan meski sisi kemanusiaan tak bisa ditinggalkan.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Jajak Pendapat Kompas
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> KH. Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU)
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas pendapat menghendaki mereka tak dipulangkan Ketakutan atas potensi kekejaman dan terorisme menjadi muara publik untuk menolak memulangkan eks NIIS Pendukung NIIS adalah pembuat gaduh Karakter NIIS menebar kebencian dan teror berpengaruh kepada pengikutnya karena berpotensi memberontak pemerintah yang sah Perlakuan yang relatif aman adalah memulangkan anak balita
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> Program deradikalisasi pemerintah harus lebih efektif mengatasi terorisme
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> Jajak Pendapat Kompas tentang keputusan pemerintah menolak memulangkan eks NIIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada

	When	<ul style="list-style-type: none"> • 12-13 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Litbang Kompas
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui pendapat publik tentang keputusan pemerintah
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengumpulan data sebanyak 530 responden melalui telpon yang dipilih secara acak di 17 kota besar.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan merupakan bentuk laporan dari hasil penelitian jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Grafik hasil penelitian yang ditampilkan setelah <i>lead</i> artikel.

a. Struktur Sintaksis

Judul dan *lead* dalam artikel ini memberikan gambaran bahwa keputusan pemerintah untuk menolak pemulangan eks NIIS bertujuan untuk melindungi negara dari kelompok terorisme. Latar informasi merupakan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Hasil dari penelitian ini ditampilkan melalui grafik dan juga penjelasan tertulis. Hasil penelitian menampilkan sebanyak 61,5 % masyarakat Indonesia tidak setuju untuk memulangkan eks NIIS, 32,8 setuju dan 5,7 menjawab tidak tahu. Berdasarkan hasil tersebut, Kompas menampilkan berbagai alasan mengapa mayoritas masyarakat menolak mereka. Pertama, ketakutan dan ancaman keamanan menjadi komponen paling kuat atas penolakan tersebut. Alasan yang digambarkan cukup rasional yaitu NIIS dianggap sebagai

kelompok yang paling bertanggung jawab atas berbagai teror yang terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Kedua, alasan hak kewarganegaraan yang telah tidak dimiliki oleh eks NIIS menjadikan salah satu alasan masyarakat menolak mereka.

Kutipan sumber dalam artikel ini hanya menampilkan pernyataan dari Ketua Umum PBNU KH. Said Agil Siradj yang dianggap Kompas sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat terkait dengan hasil penelitian ini. Menurutnya, Pendukung NIIS adalah pembuat onar dalam negara, sehingga tidak layak untuk dipulangkan. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang ditampilkan dalam artikel ini bahwa karakter NIIS menebar kebencian dan teror yang dapat mempengaruhi pengikutnya sehingga berpotensi memberontak pemerintah yang sah. Hasil penelitian yang menampilkan masyarakat yang menyetujui untuk memulangkan mereka berada di dalam hak asasi atau kemanusiaan dengan catatan harus mengikuti program khusus yang digalakan oleh pemerintah seperti rehabilitasi dan deradikalisasi. Dibagian penutup Kompas menghimbau agar program deradikalisasi pemerintah harus lebih efektif mengatasi terorisme.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini tidak memenuhi semua unsur, karena merupakan laporan ilmiah. Namun masih terdapat unsur yang ditonjolkan dalam artikel ini yaitu *why* atau alasan mengapa Kompas melakukan jajak pendapat ini. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas melalui jajak pendapat. Kompas menampilkan metodologi penelitian setelah lead pada artikel ini. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan pendapat melalui

telepon yang diselenggarakan pada tanggal 12-12 Februari 2020. Penelitian ini melibatkan 530 responden yang berasal dari 17 kota besar di Indonesia dengan kriteria informan minimal 17 tahun berbasis rumah tangga yang dipilih secara acak.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, Kompas memberikan perhatian khusus terkait dengan wacana pemulangan eks NIIS yang sempat menjadi perdebatan masyarakat. Perdebatan tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat antara masyarakat yang mendukung dan menolak pemulangan eks NIIS ke Indonesia. Melalui jajak pendapat, Kompas ingin memberikan gambaran prosentase berapa jumlah orang yang mendukung dan menolak wacana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan hal yang selaras dengan Kompas dalam membingkai isu tersebut, yaitu mendukung pemerintah untuk tidak memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

Hasil laporan penelitian ini memiliki dua tema besar yaitu alasan dari kedua pendapat mengenai wacana pemulangan eks ISIS. Pertama, sebanyak 61,5% masyarakat menolak untuk memulangkan eks NIIS yang dilandasi oleh berbagai alasan. Seperti membahayakan keamanan nasional, terpapar ideolog NIIS, telah kehilangan statusnya sebagai WNI, telah terlibat dalam aksi kekerasan dengan NIIS dan sudah bersumpah setia kepada NIIS. Alasan tersebut dijelaskan oleh Kompas melalui grafik yang ditampilkan setelah lead artikel. Kedua, sebanyak 32,8 % masyarakat mendukung untuk memulangkan eks NIIS dengan alasan sebagai berikut, kemanusiaan, masih dianggap sebagai WNI, masih bisa diplihkan

kesetiannya kepada NKRI, merasa kasihan dengan keluarganya yang ada di Indonesia, hanya mengikuti tokoh agama atau orang tua.

Secara garis besar perbedaan tersebut menjadi alasan yang paling banyak diungkapkan oleh kedua pendapat yang berbeda. Namun, dengan munculnya angka penolakan yang lebih besar daripada penerimaan. Secara implisit, Kompas ingin menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menolak untuk memulangkan eks NIIS dan menyetujui keputusan pemerintah. Sehingga secara sah suara mayoritas lebih diutamakan dengan alasan keamanan, karena pemerintah ingin menjamin rasa aman bagi 260 juta rakyat Indonesia.

d. Struktur Retoris

Grafik merupakan salah satu unsur komponen retorik dalam sebuah strategi penulisan untuk menampilkan salah satu pihak atau pendapat yang ingin ditonjolkan. Dalam artikel ini, Kompas menampilkan hasil penelitian yang digambarkan melalui grafik dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Hasil penelitian yang ditampilkan selaras dan sesuai dengan pembingkain Kompas terkait dengan pemulangan eks NIIS.

Pertanyaan retorik Kompas yang ditampilkan dalam artikel menandakan kesesuaian apa yang selama ini dibingkai oleh Kompas. Seperti pertanyaan *“sudah tepat atau tidak tepatnya Presiden Joko Widodo untuk bersikap hati-hati dalam menangani pemulangan WNI eks NIIS?”* sebanyak 79,4% tepat, 13,6% tidak tepat, 7,0% tidak tahu. Selain itu, Kompas juga menampilkan secara jelas tentang kekhawatiran Responden jika WNI eks NIIS dipulangkan ke Indonesia, yaitu;

mempromosikan ideologi radikal kepada generasi muda 28,7%, membahayakan keamanan nasional 25,7%, menghasut masyarakat untuk membenci kelompok lain 16,6%, menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah dan NKRI 10,6% , mengajak untuk melawan atau memberontak kepada pemerintah/negara 8,3%, mengajak perlawanan politik dengan cara-cara kekerasan 3,4%, tidak ada/tidak khawatir 3%, tidak tahu 3,7%.

Melalui hasil penelitian jajak pendapat yang ditampilkan, Kompas ingin memberikan penjelasan yang kuat, mengapa masyarakat harus mendukung keputusan pemerintah untuk menolak memulangkan eks NIIS.

1.1.7 Teks 7 : NIIS Membuat Dunia Repot

Teks ini merupakan laporan reportase dari kontributor Kompas yang berada di Cairo Mesir. Tulisan ini banyak memberikan informasi terkait dengan kebijakan pemulangan eks NIIS dari berbagai negara yang memiliki permasalahan yang sama dengan pemerintah Indonesia.

Tabel 3.7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • NIIS Membuat Dunia Repot
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak jatuhnya Baghouz di dekat sungai Eufrat ke tangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Maret 2019, dunia segera mengantisipasi kombatan asing NIIS dan keluarganya yang

		akan kembali ke negara asal.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kekalahan telak NIIS di wilayah terakhir
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Dalam Negeri Turki Sulaeman Soylu • Kepala Komite Anti Terorisme Tunisia Mokhtar Ben Nasr • Juru Bicara kementerian Dalam Negeri Turki Ismail Catakli
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Eropa menyambut gembira kemenangan SDF atas NIIS namun juga dilanda kepanikan. • Turki akan memulangkan eks NIIS kembali ke nagara asalnya.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Sejauh ini pemerintah Indonesia belum menjelaskan anggota NIIS asal Indonesia berada di kamp tahanan dibawah pemerintah Turki, Irak atau SDF
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Kekalahan telak NIIS oleh SDF
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Suriah
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Musthafa Abd Rahman
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Eropa dan Amerika menolak memulangkan eks NIIS ke negaranya • Indonesia menolak memulangkan eks NIIS
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Turki akan tetap memulangkan eks NIIS yang ditahan oleh pemerintahannya ke negara asal

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan artikel merupakan gambaran umum tentang negara-negara didunia yang dilematis menghadapi eks NIIS setelah kekalahannya
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto aksi masyarakat yang melakukan demonstrasi yang menyerukan penolakan pemulangan eks NIIS

a. Struktur Sintaksis

Judul dalam artikel ini memberikan gambaran tentang masalah yang dihadapi dunia pasca kekalahan NIIS oleh SDF. Lead yang ditampilkan dalam artikel ini ikut menjelaskan bagaimana masalah itu terjadi, kekalahan NIIS atas SDF memberikan masalah yang cukup dilematis. Pasalnya banyak para keluarga eks NIIS yang menginginkan kembali ke negara asalnya. Artikel ini menjelaskan tentang dilema dari negara-negara yang warga negaranya bergabung dengan NIIS. Seperti Eropa yang memiliki jumlah pengikut NIIS yang oaling besar di dunia. Dengan tegas, Eropa menolak untuk memulangkan eks NIIS ke negara asalnya, alasannya karena Uni Eropa telah mencabut kewarganegaraanya. Hal ini kemudian memunculkan dilematis bagi seluruh dunia, karena tingkat pengungsi yang cukup banyak yang terbagi kedalam tiga wilayah kamp besar yaitu dibawah pemerintah Irak, Turki dan SDF. Meski Eropa menolak memulangkan eks NII, namun Pemerintah Turki akan tetap memulangkan mereka ke neagara asalnya.

Kutipan sumber dalam artikel ini merupakan pernyataan resmi yang dikutip dari tokoh yang berwenang dalam memutuskan kebijakan ini. Pertama, kutipan dari

pemerintah Turki yaitu Menteri Dalam Negeri dan Juru Bicara Dalam negeri yang berencana akan memulangkan eks NIIS kenegara asalnya meskipun status kewarganegaraanya telah hilang. Sementara itu, Kepala Komite Anti Terorisme Tunisia Mukhtar Ben Nasr telah menerima eks NIIS yang berasal di negaranya. Dibagian penutup, artikel ini menampilkan kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak akan memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

b. Struktur Skrip

Artikel ini merupakan, laporan reportase dari kontributor Kompas yang berada di Cairo, Mesir, sehingga tidak memenuhi unsur dalam struktur skrip. Unsur skrip yang ditonjolkan dalam artikel ini berupa *why* dan *how*. Kekalahan NIIS membuat dilematis bagi berbagai negara, terutama dalam hal untuk memulangkan eks NIIS. Unsur *why* yang ditonjolkan dalam artikel ini berupa penolakan hampir semua negara untuk menerima eks NIIS ke negara asalnya sehingga cukup membuat dunia dilematis untuk memutuskan hal tersebut. unsur *how* yang ditampilkan berupa jika berbagai negara menolak memulangkan mereka, maka Turki sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas pengungsi NIIS akan memulangkan mereka meskipun negara asalnya tidak menerima. Hal ini dikarenakan, Turki mengantisipasi adanya krisis kemanusiaan.

c. Struktur Tematik

Artikel ini memiliki dua tema yang saling bersinambungan. Pertama, kekalahan NIIS menjadi masalah baru bagi berbagai negara karena arus gelombang eks NIIS yang menginginkan pulang ke negara asalnya. Namun, berbagai negara khususnya

Eropa menolak untuk menerima mereka kembali, karena ditakutkan akan mengancam keamanan negara. Penulis juga menjelaskan tentang perkiraan jumlah warga negara yang bergabung dengan NIIS, Eropa menempati urutan pertama. Ditengah kebuntuan tentang nasib eks NIIS, Pemerintah Irak dan Suriah mengusulkan untuk membuat peradilan internasional untuk menghukum eks NIIS. Terdapat tiga kamp besar yang menampung eks NIIS yang berada di Pemerintah Irak, Turki dan SDF. Nasib pengungsi dibawah SDF dan Irak masih terkatung-katung, sementara itu Turki bersikeras untuk memulangkan eks NIIS.

Kedua, penolakan eks NIIS dari berbagai negara, membuat Turki sebagai salah satu yang memiliki tanggung jawab menampung eks NIIS bersikeras untuk memulangkan mereka. Hal ini dikarenakan Turki tidak ingin dunia melapas tangan dan tidak bertanggung jawab dengan negaranya. Karena negara yang menjadi penampung eks NIIS tidak akan mampu memulangkan mereka. Sehingga pemerintah Turki bersikukuh akan memulangkan mereka secara bertahap.

Fenomena ini cukup menarik, karena terjadi percekcoakan antar berbagai negara di dunia. keberadaan NIIS secara teritorial mengancam dunia, dan pasca hilangnya wilayah teritorial tetap memunculkan dilematis bagi negara di dunia. meskipun sebagian besar negara-negara menolak memulangkan eks NIIS, terdapat negara yang menerima mereka kembali seperti Tunisia, Kuwait. Bahkan Turki juga memulangkan eks NIIS ke Eropa, Australia dan Amerika Serikat meski negara tersebut menolak mereka. Secara tegas Turki akan terus memulangkan eks NIIS yang berada di kawasannya. Meskipun Indonesia telah menolak untuk memulangkan eks NIIS tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menerima eks

NIIS yang berasal dari kamp Turki. Sehingga pemerintah perlu melakukan verifikasi dini agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

d. Struktur Retoris

Melalui artikel ini, secara retoris Kompas menunjukkan bahwa penolakan pemulangan eks NIIS tidak hanya Indonesia saja, tetapi terjadi juga di berbagai negara dengan alasan yang relatif sama. Penolakan dari berbagai negara diterangkan dalam artikel ini melalui hasil forum internasional yang menolak untuk memulangkan eks NIIS ke negara asalnya karena ditakutkan mengancam keamanan. Penolakan tersebut berasal dari negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Keputusan pemerintah dengan tidak memulangkan eks NIIS dianggap telah tepat karena hampir semua negara menolak. Keputusan pemerintah yang dianggap telah tepat oleh Kompas juga ditunjukkan melalui gambar pada artikel ini yang berupa demonstrasi dari masyarakat yang menolak untuk memulangkan eks NIIS.

1.1.8 Teks 8 : Pasca Penolakan Kombatant NIIS

Teks ini merupakan analisis politik yang ditulis oleh Peneliti Senior CSIS (*Central Strategic of International Studies*). Artikel ini berupa tantangan bagi pemerintah setelah memberi keputusan untuk menolak pemulangan eks NIIS. Artikel ini juga membahas tentang berbagai macam bentuk sebab munculnya kelompok radikal yang tidak hanya muncul di Indonesia tetapi juga dari berbagai negara.

Tabel 3.8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pasca Penolakan Kombatans NIIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Ketegasan pemerintah menolak pemulangan kombatans Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang disertai konsiderasi kemungkinan memulangkan perempuan dan ana-anak dibawah umur 10 tahun mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan pemulangan eks NIIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Radikalisme muncul sebab adanya kesenjangan sosial ekonomi yang melebar serta menguatkan oligarki elite politik • Ketidakpercayaan publik atas lembaga yang bertugas melayani publik mendorong masyarakat mencari alternatif sendiri (dapat melalui janji manis perubahan yang dibalut agama)
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan sentimen primodialisme harus diterapkan saat masih kanak-kanak yang dimulai dari lingkungan sekitar termasuk orang tua
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Pasca penolakan pemulangan eks NIIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada

	Who	<ul style="list-style-type: none"> • J Kristiadi (Peneliti Senior CSIS)
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Politik terkait dengan munculnya NIIS di Indonesia
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan artikel merupakan analisis politik yang memberikan opini tentang munculnya gerakan radikalisme seperti NIIS dan kelompok lainnya
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutip buku Robert Michels tentang hukum besi oligarki dalam buku <i>Political Parties</i>.

a. Struktur Sintaksis

Judul dan *lead* pada artikel ini menampilkan tantangan pemerintah Indonesia setelah memutuskan untuk tidak memulangkan eks NIIS ke Indonesia. Latar informasi merupakan tanggapan dari penulis artikel tentang sebab dan maraknya kelompok radikal yang muncul di Indonesia. Tidak ada kutipan yang ditampilkan dalam artikel ini karena berupa pendapat dari penulis lepas. Opini yang dibangun didalam artikel ini memberikan gambaran tentang munculnya gerakan radikalisme yang disebabkan oleh ulah elit politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya. Ditambah dengan suburnya politik oligarki dalam negara membuat masyarakat merasa jengah dan mencari alternatif lain yang dapat menampung mereka. Alternatif tersebut berupa rujukan identitas primordial yang dibalut dengan agama, yang pada akhirnya menimbulkan sentimen agama dan kelompok. Dibagian penutup, penulis memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih

mengajarkan generasi muda khususnya anak-anak memiliki pemahaman pluralisme yang baik dan dibangun serta diasah melalui lingkungan sekitar, seperti keluarga.

b. Struktur Skrip

Artikel ini merupakan analisis politik dalam kolom Kompas yang diisi oleh Penulis Senior CSIS J Krsistiadi. Struktur skrip dalam artikel ini tidak lengkap karena berisi tentang opini dari penulis. Namun, terdapat unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini berupa unsur *how*. Yaitu tentang bagaimana asal munculnya kelompok radikalisme dalam sebuah negara. Artikel ini tidak spesifik menggambarkan Indonesia saja, karena kemunculan kelompok radikal merupakan fenomena global yang dihadapi oleh berbagai negara.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini berupa kajian yang ditulis oleh penulis senior CSIS tentang tantangan Indonesia pasca menolak pemulangan eks NIIS. Tema besar yang ditampilkan dalam artikel ini berupa kritik terhadap pemerintah yang mengabaikan fungsi lembaga negara sebagai pelindung rakyat, pemerintah saat ini lebih fokus terhadap kepentingan golongannya sendiri sehingga mengabaikan tugas pokok pemerintah sebagai pengayom rakyat. Gagasan tersebut dikutip oleh penulis melalui kajian ilmiah yang diambil dari buku yang berjudul *Political Parties* yang ditulis oleh Robert Michels. Dalam bukunya dijelaskan mengenai hukum besi oligarki yang melanda jagat politik pada tataran politik mondial dan domestik. Akibat dari munculnya politik oligarki akhirnya memicu lembaga politik yang korup dan semakin memarjinalkan rakyat kecil.

Akibat dari sistem politik yang tidak sehat, akhirnya muncul pemberontakan dari masyarakat yang dikendarai oleh kelompok radikal. Hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, menimbulkan kelompok tersebut lebih mempercayai dalil utopia dengan menawarkan kebahagiaan kilat berupa janji nikmat surgawi. Secara eksplisit artikel ini memberi kritik kepada pemerintah agar melaksanakan fungsinya sebagai pelindung dan pemberi kesejahteraan rakyat, agar kemunculan kelompok radikal seperti NIIS dapat ditekan atau diantisipasi.

d. Struktur Retoris

Secara retorik, artikel ini merupakan bentuk kritik Kompas kepada pemerintah atas munculnya kelompok radikal di Indonesia. Meskipun Kompas telah mendukung keputusan pemerintah untuk menolak pemulangan eks NIIS ke Indonesia, namun Kompas tetap kritis terkait dengan penyebab munculnya kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kritikan yang disampaikan oleh J kristadi melalui analisis politiknya, bahwa kemunculan kelompok radikal merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Ditambah elit politik hanya mementingkan golongannya sendiri, sehingga muncul pemberontakan yang digawangi oleh berbagai ideologi, khususnya ideologi radikal berbasis agama.

3.2 Hasil Rangkuman Analisis *Framing Kompas*

Dari keseluruhan teks yang dianalisis diatas, dapat dilihat bahwa kedelapan teks tersebut memiliki strategi penulisan yang sama, Kompas menggunakan istilah NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) sebagai representasi kelompok ISIS dengan memakai bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh publik. Berikut akan

dipaparkan secara ringkas hasil analisis framing koran *Kompas* menggunakan Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki;

Tabel 3.9

No	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	Elemen	Strategi Penulisan
1	Pemerintah Tak Memulangkan	Sintaksis	Wawancara dengan tokoh agama dari organisasi masyarakat Islam PBNU yang menolak pemulangan eks NIIS. Kompas menempatkan keputusan resmi pemerintah diawal tulisan, dan disusul dari tokoh agama yang mendukung keputusan pemerintah.
		Skrip	Penekanan pada aspek legalitas. Sementara sisi kemanusiaan tidak mendapatkan liputan. Penekanan pada UU Kewarganegaraan sebagai teroris lintas batas.
		Tematik	(1) pernyataan eks NIIS adalah kelompok yang membuat gaduh yang dipandang sesuai agama. (2) pernyataan bahwa eks NIIS tidak layak pulang karena termasuk dalam kategori teroris lintas batas. (3) pernyataan eks NIIS tidak setia dan penghianay NKRI
		Retoris	Pemberian label eks NIIS sebagai teroris lintas batas atau <i>FTF Foreign Terrorist Fighter</i> termasuk anak-anak oleh pakar yang diwawancarai, memberi bukti bahwa eks NIIS semuanya adalah teroris aktif
2	Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi	Sintaksis	Wawancara dengan tokoh agama dari organisasi masyarakat PP Muhammadiyah yang memberi kelonggaran untuk memulangkan eks NIIS. Namun, Kompas menempatkan tokoh pejabat yang menolak memulangkan mereka diawal tulisan.
		Skrip	Penekanan pada aspek kewaspadaan pemerintah untuk melakukan verifikasi keamanan agar tidak kebobolan.
		Tematik	(1) pernyataan pejabat publik yang memberi sanksi tegas bagi eks NIIS yang mencoba masuk ke Indonesia (2) pernyataan tokoh agama bahwa verifikasi penting dilakukan untuk mendata eks NIIS (3) melalui

			verifikasi pemerintah dapat mengetahui mana eks NIIS yang menjadi kombatan atau hanya simpatisan (4) pernyataan tidak semua eks NIIS dipulangkan
		Retoris	Pemunculan tokoh agama yang di wawancarai bahwa pemerintah memperhatikan aspek kemanusiaan dengan melakukan verifikasi dan mempertimbangkan untuk memulangkan eks NIIS melalui kriteria tertentu.
3	Langkah Tegas Pemerintah Sikapi NIIS	Sintaksis	Pernyataan tegas dari editorial Kompas dalam tajuk rencana yang mendukung keputusan pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks NIIS
		Skrip	Penekanan pada aspek legatitas pada UU Kewarganegaraan
		Tematik	Pernyataan Kompas bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi terorisme di kemudian hari
		Retoris	Pemakaian klaim nasionalisme untuk mendukung gagasan pendapat tentang penolakan pemulangan eks NIIS
4	Menolak Kombatan ISIS	Sintaksis	Tulisan lepas dari tokoh agama Sekjen PBNU yang mendukung pemerintah menolak memulangkan eks NIIS.
		Skrip	Penekanan pada aspek UU kewarganegaraan UU 12 tahun 2006 dan Penekanan pada pendekatan agama menggunakan kitab suci Al-Qur'an dan pemutusan masalah dengan pendekatan Ulama klasik (<i>bahsul masail</i>)
		Tematik	(1) pernyataan pada aspek primordial nasionalitas yang dikutip dari pakar internasional (2) pernyataan yang ditinjau dari sudut agama yang memandang kebijakan pemerintah tepat
		Retoris	Pemakaian ayat Al-Qur'an sebagai dalil agama untuk memperkuat gagasan/pendapat
5	Bahaya Pemulangan Eks NIIS	Sintaksis	Tulisan dari pengamat Teroris yang memberikan contoh kasus dan korban dari aksi terorisme yang berafiliasi dengan NIIS
		Skrip	Pendapat pakar terorisme yang pro terkait dengan kebijakan pemerintah menolak memulangkan eks NIIS dengan argumentasi yang sistematis dan rasional

		Tematik	(1)Pernyataan Indoensia memiliki kelompok aktif yang masih berafiliasi dengan NIIS (2) penekanan pada eks NIIS akan menjadi calon teroris baru (3) Pernyataan bahwa rehabilitasi atau deradikalisasi tidak dapat menjamin lunturnya ideologi teroris
		Retoris	Pemberian label otoritas dari pakar yang ditampilkan memberi bukti dan klaim tentang bahayanya eks NIIS jika dipulangkan.
6	Lindungi Negara dari Terorisme	Sintaksis	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas melalui jajak pendapat yang menguatkan keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan eks NIIS sangat tepat.
		Skrip	Penekanan pada hasil penelitian yang menunjukkan respon masyarakat terkait dengan wacana pemulangan eks NIIS ke Indonesia baik pro maupun kontra dengan argumentasi yang sama-sama kuat
		Tematik	(1)pernyataan dari mayoritas yang menghendaki eks NIIS tidak dipulangkan (2) Pernyataan tentang NIIS yang menjadi kelompok yang menebar kebencian (3) pendapat masyarakat yang banyak menyetujui memulangkan balita
		Retoris	Pemakaian hasil penelitian dengan menggunakan infografik sebagai klaim rasional secara keilmuan untuk mendukung keputusan pemerintah yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia.
7	NIIS Membuat Dunia Repot	Sintaksis	Reportase dari kontributor Kompas yang berada di Cairo Mesir untuk menggambarkan kondisi negara-negara menghadapi wacana pemulangan eks NIIS. Tulisan diawali dengan kebijakan berbagai negara yang menolak memulangkan eks NIIS ke negaranya
		Skrip	Penekanan pada aspek legalitas yang menggunakan status kewarganegaraan untuk menolak memulangkan eks NIIS. Sebagian negara mencabut kewarganegaraan mereka.
		Tematik	(1) pernyataan dari berbagai negara yang menolak memulangkan eks NIIS terutama dari Eropa dan Amerika Serikat.(2) Terdapat

			salah negara yang menerima eks NIIS kembali dipulangkan ke negaranya (3) eks NIIS yang tertahan di kamp Turki akan dipulangkan. (4) Meski telah menolak memulangkan eks NIIS, Pemerintah tetap harus waspada karena Turki akan memungkan eks NIIS jika ada pengungsi Indonesia yg menempati kamp Turki.
		Retoris	Merujuk pada kebijakan dari berbagai negara yang menolak memulangkan eks NIIS untuk mendukung keputusan pemerintah sebagai langkah tegas melindungi keamanan internasional.
8	Pasca Penolakan Kombatans NIIS	Sintaksis	Tulisan dari pakar politik yang mempunyai pandangan terkait dengan tantangan negara setelah menolak memulangkan eks NIIS
		Skrip	Pendapat dari pakar politik yang menyatakan bahwa radikalisme merupakan akar dari munculnya NIIS
		Tematik	Pernyataan ketidakpercayaan publik atas lembaga yang bertugas melayani publik mendorong masyarakat mencari alternatif sendiri (dapat melalui janji manis perubahan yang dibalut agama)
		Retoris	Pemberian dari label otoritas keilmuan dari pakar yang ditampilkan dalam analisis politik memberi gambaran Kompas melakukan fungsi media untuk mengkritisi pemerintah setelah mendukung kebijakannya.

3.3 Analisis Framing *Koran Tempo*

3.3.1 Teks 1 : Pemerintah Minta Waktu Kaji Pemulangan Mantan Anggota ISIS

Berita ini merujuk pada pembingkaiannya pemulangan eks ISIS yang masih belum ditemukan solusinya. Berdasarkan pernyataan pemerintah yang dihimpun, pemerintah cenderung enggan untuk memulangkan eks ISIS, namun keputusan

tersebut masih akan dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Lembaga negara terkait.

Tabel 3.10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Minta Waktu Kaji Pemulangan Mantan Anggota ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan terhadap anak-anak harus dibedakan dengan orang tuanya
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz MD, Menkopolkam • Joko Widodo, Presiden Indonesia
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengambil keputusan terkait dengan pemulangan eks ISIS terdapat hal-hal yang diperhatikan yang berkisar tentang HAM, agama, moral dan kajian terhadap perempuan dan anak-anak. • Kecenderungan pemerintah tidak akan memulangka eks ISIS • WNI yang membakar paspor lazimnya tidak akan dipulangkan ke Tanah Air • Pencabutan kewarganegaraan yang terlibat dalam tindak terorisme belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. • Siapapun orangnya jika masih WNI maka

		pemerintah harus mengurus.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulangan anak mantan eks ISIS tanpa orang tua bukan tanpa persoalan. Namun pilihan ini dinilai lebih baid dibandingkan membawa serta orang tuanya yang mungkin masih terpapar ideologi radikal.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana pemulangan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli Ulama Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin • Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Menanti keputusan pemerintah untuk memulangkan atau menolak menulangkan eks ISIS
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus memetakan profil mantan anggota ISIS sebelum memberikan keputusan. Bebrapa diantaranya berhak untuk dipulangkan seperti anak-anak dan perempuan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Tulisan awal merupakan pandangan atau opini dari tokoh nasional terkait dengan pro dan kontra pemulangan eks ISIS yang masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. • Tulisan di paragraf terakhir merupakan saran dari

		Komisi HAM kepada pemerintah untuk mempertimbangkan sisi kemanusiaan sebelum mengambil keputusan
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto : Tenaga Ahli Ulama Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dan Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib dalam diskusi Cross Check “Menimbang Kombatans ISIS Pulang”. • Grafik : Alternatif Pemulangan bagi eks ISIS ke Indonesia

a. Struktur Sintaksis

Judul artikel ini merupakan tanggapan serius dari pemerintah terkait dengan wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang untuk memutuskan secara tepat mengenai pemulangan mereka, apakah ditolak atau dipulangkan dengan bersyarat. Lead yang ditampilkan oleh Koran Tempo menunjukkan penanganan terhadap anak-anak dan orang dewasa harus dibedakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat paparan radikalsime sangat berbeda dari yang diterima oleh anak-anak dan orang dewasa. Latar informasi dalam artikel ini berupa penantian keputusan pemerintah terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Tanah Air.

Kutipan sumber dalam artikel merupakan pernyataan dari Menkopolkum Mahfudz Md yang menyatakan bahwa pemerintah cenderung tidak akan memulangkan eks ISIS namun pemerintah masih melakukan pengkajian hingga bulan April mendatang. Sumber kutipan lainnya merupakan pernyataan dari

Presiden Joko Widodo yang menyatakan warga negara yang telah membakar paspornya secara lazim sudah kehilangan kewarganegaraan sehingga tidak patut untuk dipulangkan, namun pemerintah akan mengkaji lebih dalam ke dalam ratas atau rapat terbuka bersama dengan BNPT dan Wakil Presiden.

Sumber utama dalam artikel merupakan pernyataan dari Staf Khusus Presiden Ali Ngabalin dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Menurut Ali, pemulangan eks ISIS masih dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yang berkisar tentang HAM, agama, moral dan kajian terhadap perempuan dan anak-anak, agar keputusan tersebut mampu melindungi negara dari ancaman di masa depan. Sedangkan Ahmad menyarankan kepada pemerintah untuk memetakan profil eks ISIS sebelum mengambil keputusan, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat menangani mereka secara berbeda-beda sesuai dengan tingkat paparan ideologi radikal yang diterimanya. Ahmad juga menambahkan jika pemerintah ingin memulangkan anak-anak eks ISIS saja, maka pemerintah harus perlu membuat peraturan baru untuk menghapus kewarganegaraan orang tua mereka.

Dibagian penutup, artikel ini menampilkan pernyataan dari Ahmad bahwa siapapun yang masih menjadi WNI, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengurusnya. Secara implisit, melalui artikel ini terutama dibagian pentup, Koran Tempo menonjolkan bahwa eks ISIS yang masih menjadi bagian dari WNI harus diberikan peluang untuk diselamatkan oleh negara.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini telah mencakup kelengkapan unsur skrip berupa 5W dan 1H. terdapat dua aktor yang ditampilkan dalam artikel ini melalui unsur *who* yaitu; Tenaga Ahli Ulama Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik. Kedua pernyataan tersebut menjadi highlight dalam artikel ini. Unsur *why* yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan penantian keputusan pemerintah untuk memulangkan atau menolak eks ISIS yang masih dalam tahap pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin. Sedangkan pada unsur *how* dilengkapi oleh pernyataan dari Ahmad Taufan yang mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk memulangkan atau menolak eks ISIS, pemerintah harus memetakan profil mantan anggota ISIS karena beberapa diantaranya berhak untuk dipulangkan seperti anak-anak dan perempuan.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini menampilkan dua tema yang cukup berkaitan dari narasumber utama yaitu Tenaga Ahli Ulama Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik. Pada awal tulisan, Koran Tempo menampilkan pemerintah yang belum memiliki keputusan resmi terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Tanah Air, meskipun Menkopolhuam Mahfudz Md dan Presiden Indonesia Joko Widodo memiliki kecenderungan untuk tidak memulangkan mereka. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan kajian-kajian yang akan dibahas bersama dalam rapat terbatas dengan beberapa lembaga negara yang menaungi masalah tersebut. Menurut Ali,

berbagai kajian yang akan membahas tentang keputusan pemerintah akan melihat beberapa aspek seperti HAM, agama, moral dan kajian terhadap perempuan dan anak-anak.

Diakhir tulisan, Koran Tempo menampilkan pernyataan dari Ketua Komisi Nasional HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyatakan bahwa sebelum mengambil keputusan, pemerintah harus terlebih dahulu memetakan profil eks ISIS agar penanganan dapat dibedakan. Pemerintah juga harus memerhatikan, jika ingin memulangkan anak-anak eks ISIS saja tanpa memulangkan orang tuanya, maka pemerintah harus memiliki regulasi khusus untuk mengatur hal tersebut. UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ikut ditampilkan dalam artikel ini yang memandang bahwa UU tersebut tidak dapat dijadikan referensi untuk menghapus status kewarganegaraan terkait dengan tindakan terorisme karena dalam UU tidak disebutkan. Secara implisit, Koran Tempo menunjukkan bahwa pemerintah harus menimbangkan untuk memulangkan eks ISIS tanpa harus dipukul rata, karena beberapa diantaranya bukan merupakan kelompok kombatan yang membahayakan, justru terdapat kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti anak-anak dan perempuan.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, Koran Tempo ingin menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki keputusan yang tepat terkait dengan penanganan pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Pemerintah digambarkan masih memerlukan waktu untuk mengkaji keputusan tersebut dengan memerhatikan berbagai aspek. Meskipun pemerintah belum memberikan keputusan resmi, Tempo menampilkan ada kecenderungan

pemerintah untuk menolak memulangkan mereka melalui pernyataan Menkopolkam dan Presiden Indonesia yang dikutip. Selain itu, Koran Tempo juga menampilkan saran yang dibalut oleh pernyataan dari Komisi Nasional HAM, bahwa pemerintah perlu memetakan profil eks ISIS agar pemerintah dapat memutuskan mana yang seharusnya dapat dipulangkan dan tidak, artinya pemerintah tidak boleh memukul rata melalui keputusan untuk menolak atau memulangkan eks ISIS ke Indonesia.

Koran Tempo juga menampilkan grafik alternatif kepulauan tentang beberapa alasan pro dan kontra terkait dengan menolak atau mendukung memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Jika tidak dipulangkan Tempo menampilkan beberapa resiko, pertama, dikhawatirkan pergerakan eks ISIS tidak terpantau jika kamp-kamp pengungsi akan dibubarkan, mereka cenderung untuk pulang secara ilegal dan akan lebih membahayakan. Kedua, Indonesia akan mendapat kecaman dari dunia internasional sebagai negara yang tidak memperdulikan warga negaranya terutama anak-anak dan perempuan. Ketiga, terdapat gejala politik, Presiden Jokowi akan mendapatkan kritik dari lawan politiknya. Sementara resiko jika eks ISIS dipulangkan, pertama, pemerintah belum memiliki sistem deradikalisasi yang kuat, sehingga tidak bisa menjamin apakah eks ISIS yang dipulngkan dapat disadarkan atau tetap dengan keyakinan ideologinya. Kedua, pemulangan anak-anak dan perempuan merupakan opsi yang paling aman namun pemerintah harus memerlukan identifikasi dan penyarinyan yang kuat.

3.3.2 Teks 2 : Dilema Pemulangan Mantan ISIS

Pemulangan eks ISIS ke tanah air menjadi hal yang cukup dilematis bagi pemerintah. Artikel ini menyebutkan pemerintah tidak boleh hanya melihat pada satu aspek saja saat memutuskan kebijakan tersebut, namun pemerintah harus memperhatikan aspek lain agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari yang menyangkut kemanan nasional dan citra negara di kancah internasional.

Tabel 3.11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Dilema Pemulangan Mantan ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah terhadap wacana untuk memulangkan sekitar 660 bekas anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana Pemulangan eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Agama Fachrul Razi • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD • Presiden Joko Widodo
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi kemanusiaan, pemerintah tidak boleh menafikan keberadaan anak-anak yang tidak berdosa di kamp-kamp pengungsian karena berisiko negatif terhadap nama baik Indonesia di mata internasional.

		<ul style="list-style-type: none"> • Dengan program deradikalisasi yang tepat dan efektif, sebagian dari eks anggota ISIS mungkin masih bisa kembali menjadi warga negara yang baik. • Mereka adalah korban bujuk rayu dari iklan-iklan yang ditebar ISIS dan kelompok garis keras lain yang selama ini memanfaatkan Internet untuk merekrut simpatisan-simpatisan dari berbagai penjuru dunia.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang pemerintah belum memiliki formula yang bisa diandalkan untuk melakukan budaya tandingan dan mengembangkan program deradikalisasi yang efektif, ada baiknya keputusan untuk memulangkan bekas anggota ISIS ditunda. Ini harus diakui bukan keputusan yang mudah.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulangan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • 11 Februari 2020
	When	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Bagong Suyanto, Guru besar FISIP Universitas Airlangga, peneliti radikalisme dan deradikalisasi
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana Pemulangan eks ISIS
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pemerintah belum memiliki program yang matang, baiknya

		menunda pemulangan eks NIIS
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan memberikan gambaran tentang wacana pemulangan eks ISIS yang harus dipikirkan dari berbagai aspek terutama kemanusiaan bukan hanya mengenai hukum secara absolut
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia sebagai thogut atau setan sembah manusia, • Secara konseptual, eks anggota ISIS dapat didekonstruksi dan direkonstruksi kembali adalah melalui program deradikalisasi yang benar-benar efektif.

a. Struktur Sintaksis

Artikel ini terbit sebelum keputusan resmi pemerintah yang memiliki sikap netral dalam melihat isu terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Judul dan *lead* pada artikel memberikan gambaran yang dilematis bagi pemerintah maupun masyarakat terkait dengan penantian keputusan tersebut. Latar informasi yang menjadi dasar munculnya artikel ini merupakan wacana pemulangan eks ISIS yang menjadi perbincangan banyak pihak setelah Menteri Agama Indonesia Fachrul Razi memberikan komentar yang akan memulangkan eks ISIS ke Indonesia, sehingga memunculkan wacana polemik yang krusial di masyarakat. Meskipun belum ada keputusan resmi dari pemerintah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfudz MD dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengaku keberatan

dan menolak untuk memulangkan eks ISIS ke Indonesia, dengan alasan untuk menjaga keamanan dari tindak teror di masa depan.

Terdapat beberapa opini yang dijabarkan oleh penulis melalui artikel ini yaitu, pertama, keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS dengan dalih kehilangan kewarganegaraan dirasa masuk akal karena alasan tersebut berdasar pada UU Kewarganegaraan. Kedua, pemerintah tidak boleh memukul rata saat mencabut status kewarganegaraan bagi eks ISIS karena diantaranya terdapat, anak-anak dan perempuan yang tidak tahu apa-apa saat lahir dan situasi yang berada di kamp Suriah dan kamp pengungsian. Pemerintah harus memiliki kebijakan khusus untuk mengkaji kelayakan mereka untuk dipulangkan.

Ketiga, saran penulis kepada pemerintah untuk membangun program deradikalisasi yang matang jika memilih memulangkan eks ISIS. Dengan adanya program deradikalisasi yang tepat dan efektif, sebagian dari eks ISIS mungkin masih bisa menjadi warga negara yang baik. Karena beberapa diantara mereka menjadi korban dari iklan ISIS yang menjajjikan hidup layak di Suriah. Dibagian penutup, penulis kembali memberikan saran kepada pemerintah jika pemerintah belum memiliki formula yang bisa diandalkan untuk mengembangkan program deradikalisasi yang efektif, ada baiknya keputusan untuk memulangkan bekas anggota ISIS ditunda. Secara implisit, artikel ini ingin menunjukkan bahwa pemulangan eks ISIS harus dikaji dengan serius dan tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini tidak lengkap, karena artikel ini merupakan sebuah artikel opini yang ditulis oleh Bagong Suyanto, Guru besar FISIP Universitas Airlangga, peneliti radikalisme dan deradikalisasi yang mengamati tentang wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Terdapat dua unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini yaitu berupa *how* dan *why*. Pada unsur *why* artikel ini menjelaskan tentang kondisi dilematis yang dihadapi oleh pemerintah saat akan mengambil keputusan terkait dengan memulangkan atau menolak eks ISIS asal Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia. Pada unsur *how* penulis memberikan saran berupa pengambilan keputusan harus dilakukan secara serius dan harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Pemerintah dituntut tidak hanya memperhatikan aspek rasional hitam-putih saja tetapi juga aspek yang lainnya, karena jika hal tersebut diabaikan, maka pemerintah akan memiliki citra buruk di dunia internasional.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini memiliki satu tema utama yaitu, peran pemerintah untuk menciptakan program deradikalisasi bagi eks ISIS asal Indonesia. Pada struktur sintaksis penulis telah menjelaskan tentang kondisi dilematis yang dialami oleh Pemerintah. Di satu sisi pemerintah enggan memulangkan eks ISIS karena mereka telah dengan sukareka melaps identitasnya sebagai WNI dengan membakar paspor dan menjadi bagian dari negara asing serta menganggap negara Indonesia sebagai negara *toghut* atau negara yang sesat menurut mereka. Di sisi lainnya, pemerintah tidak boleh menyamaratakan keengganan untuk memulangkan eks ISIS karena

diantaranya terdapat anak-anak dan perempuan yang tidak memahami kondisi atau situasi di Suriah. Sehingga, pemerintah perlu memikirkan mereka melalui pembentukan program deradikalisasi yang tepat sebagai bentuk persiapan. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dan exit strategy yang tepat maka sama saja dengan membuka lebar-lebar bagi para teroris untuk menebar teror di Indonesia.

Artikel ini juga mengutip penelitian yang dilakukan oleh John Horgan (2011) yang menganggap pemahaman deradikalisasi gagal dalam membedakan antara dimensi kognitif dan perilaku deradikalisasi. Menurutnya pemahaman deradikalisasi yang diterima oleh masyarakat hanya sebatas upaya untuk mengajak kelompok-kelompok radikal meninggalkan cara kekerasan. Dalam pandangan Horgan, hal tersebut bukan deradikalisasi, melainkan *disengagement*, karena hanya berkaitan dengan perubahan perilaku. Karena *disengagement* tidak menuntut perubahan ide atau pandangan, tapi hanya penolakan menggunakan kekerasan. Padahal, untuk memastikan bekas anggota ISIS yang dipulangkan tidak menimbulkan masalah baru, yang penting adalah bagaimana di tingkat kognitif atau keyakinan mereka benar-benar telah berubah.

Artikel ini juga menunjukkan contoh tentang bagaimana media asing mewawancarai mantan anggota ISIS dengan menampilkan sisi bahwa mereka adalah korban bujuk rayu dari iklan-iklan yang ditebar ISIS dan kelompok garis keras lain yang selama ini memanfaatkan Internet untuk merekrut simpatisan-simpatisan dari berbagai penjuru dunia. Target radikalisasi adalah anak-anak muda, yang memang terhadap ajakan bergabung dengan kelompok ekstrem.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, artikel ini memberikan dukungan serta saran bagi pemerintah untuk mengkaji secara lebih serius terkait dengan wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Secara implisit artikel ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa memulangkan eks ISIS tidak mudah, perlu persiapan yang lebih matang agar tidak terjadi ancaman di kemudian hari. Sehingga pemerintah dituntut untuk memikirkan program tersebut dengan matang sebelum mengambil keputusan. Melalui artikel ini, Koran Tempo ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh menyamaratakan eks ISIS sebagai kelompok teror karena diantaranya terdapat anak-anak dan perempuan yang harus dipertimbangkan untuk dipulangkan, tentunya dengan memiliki program yang matang dan efektif agar tidak menimbulkan ancaman. Karena secara konseptual, eks anggota ISIS dapat didekonstruksi dan direkonstruksi kembali melalui program deradikalisasi yang benar-benar efektif.

3.3.3 Teks 3 : Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Warga Indonesia Eks ISIS

Pemerintah telah resmi memberikan keputusan tidak akan memulangkan eks ISIS ke tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfudz Md usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden, Wakil Presiden serta Lembaga Negara terkait untuk menolak memulangkan eks ISIS demi menjaga stabilitas keamanan negara.

Tabel 3.12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Warga Indonesia Eks ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Mahfudz Md. Mengatakan pemerintah sudah memutuskan tidak akan memulangkan warga Indonesia yang bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Suriah serta teroris lintas batas negara atau <i>foreign fighter terrorist</i> (FTF)
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan resmi pemerintah menolak memulangkan eks ISIS ke Indonesia
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz Md, Menkopohukam • Febri Ramdani, WNI eks ISIS yang telah pulang ke Indonesia pada tahun 2017
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia. • Data warga Indonesia yang bergabung dengan FTF maupun ISIS

		<p>mencapai 689 orang, 228 sudah terverifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tetap mempertimbangkan akan memulangkan anak-anak dan orang tua yang bergabung dengan ISIS atau teroris lintas batas.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan eks ISIS berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi terbaik kepada ratusan WNI yang masih berada di Timur Tengah.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan resmi pemerintah menolak memulangkan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz Md, Menkopohukam
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeritah menolak memulangkan eks ISIS karena ingin menjaga stabilitas keamanan negara.
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menolak memulangkan teroris dan FTF namun akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak dibawah 10 tahun dan orang tuanya.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan menampilkan keputsan pemerintah yang tidak memulangkan eks ISIS ke Indonesia.

Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto : peserta aksi menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia didepan Istana Merdeka. • Menyebutkan <i>mantan eks ISIS</i>
------------------	----------------------------------	---

a. Struktur Sintaksis

Judul dan *lead* dalam artikel ini telah memberikan penjelasan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Keputusan tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Mahfudz Md seusai melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri di Istana Bogor. Latar informasi dalam artikel ini merupakan keputusan resmi pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS dengan alasan atas pertimbangan keamanan dalam negeri untuk menjaga 267 juta rakyat Indonesia.

Opini yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan pernyataan dari Mahfudz Md yang menyatakan bahwa, Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap eks ISIS dapat mengancam keamanan negara. Mahfudz Md juga menyatakan data warga Indonesia yang bergabung dengan FTF maupun ISIS mencapai 689 orang, 228 sudah terverifikasi. Meskipun, pemerintah telah memutuskan untuk menolak memulangkan eks ISIS, pemerintah tetap

mempertimbangkan akan memulangkan anak-anak dan orang tua yang bergabung dengan ISIS atau teroris lintas batas.

Sumber kutipan yang ditampilkan oleh Koran Tempo merupakan salah satu eks ISIS yang telah dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2017. Penampilan tersebut bertujuan untuk memperlihatkan bahwa tidak semua eks ISIS merupakan kelompok yang membahayakan. Dibagian penutup Koran Tempo menampilkan sosok eks ISIS yang berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi terbaik kepada ratusan WNI yang masih berada di Timur Tengah.

b. Struktur Skrip

Artikel ini memiliki struktur skrip yang lengkap mencakup 5W dan 1H. penonjolan unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini berupa unsur *what*, *why* dan *how*. Pada unsur *what*, Koran Tempo menampilkan tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam memiliki otoritas terkait dengan keputusan pemerintah yang menolak memulangkan eks ISIS yaitu Mahfudz Md sebagai Menteri Politik, Hukum dan Keamanan. Pada unsur *why*, artikel ini menjelaskan alasan pemerintah yang menolak untuk memulangkan mereka karena pemerintah ingin melindungi 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman teroris. Sedangkan pada unsur *how* artikel ini menjelaskan pemerintah tidak akan memulangkan eks ISIS dan juga kelompok lain yang dianggap sebagai kelompok teroris lintas batas ke Indonesia.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini menampilkan keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS dengan alasan utama yaitu melindungi warga negara dari

ancaman terorisme, mereka menganggap eks ISIS merupakan kelompok teroris lintas batas atau *foreign terrorist fighter (ftf)*. Dalam pernyataan Menkopolkam yang dikutip oleh Koran Tempo, data eks ISIS yang tersebar di beberapa negara mencapai 689 orang dan sebanyak 228 telah terverifikasi. Pemerintah berencana untuk mempertimbangkan untuk memulangkan eks ISIS bagi anak-anak dibawah usia 10 tahun.

Melalui pernyataan tersebut, Koran Tempo menampilkan diksi bahwa pemerintah menganggap eks ISIS merupakan kelompok teroris yang menjadi ancaman negara dan termasuk dalam FTF, sehingga secara tidak langsung mbingkai bahwa eks ISIS tidak layak untuk dipulangkan. Meskipun pemerintah telah menolak untuk memulangkan mereka, Koran Tempo juga menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dibawah usia 10 tahun. Sehingga secara implisit, Tempo ingin menunjukkan bahwa pemerintah masih memikirkan nasib eks ISIS meskipun memutuskan untuk menolak mereka.

d. Struktur Retoris

Secara retorik, artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah secara tegas menolak untuk memulangkan eks ISIS. Namun, pernyataan dan beberapa alasan tersebut dibalut oleh Koran Tempo dengan menampilkan Febri Ramdani, salah satu eks ISIS yang dipulangkan pada tahun 2017 dan berhasil membaaur dengan masyarakat. Penampilan tersebut menandakan bahwa Koran Tempo tidak sepenuhnya mendukung pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS. Karena beberapa diantara mereka tidak sepenuhnya menjadi teroris atau sering disebut

sebagai kombatan. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan nasib eks ISIS yang tidak sepenuhnya menjadi kombatan seperti apa yang dialami oleh Febri Ramdani untuk dapat dipulangkan ke Indonesia. Pernyataan feбри dalam artikel ini juga ikut menggambarkan agar pemerintah memberikan solusi terbaik bagi para eks ISIS yang masih terjebak di Timur Tengah.

3.3.4 Teks 4 : Pemerintah Verifikasi Data Warga Indonesia Eks ISIS

Berita ini memberikan gambaran bahwa pemerintah akan melakukan verifikasi data eks ISIS yang tersebar di beberapa negara. Hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki data yang valid agar mereka dapat diidentifikasi. *Koran Tempo* membingkai ada kemungkinan hasil dari verifikasi tersebut dapat memulangkan eks ISIS yang tidak terlibat sebagai kombatan atau FTF.

Tabel 3.13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Verifikasi Data Warga Indonesia Eks ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak dari bekas anggota ISIS yang akan dipulangkan rencananya mendapat pembinaan kontra-radikalisasi.
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan penolakan pemulangan eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Staff Keprisedenan, Moeldoko • Menkopolhukam, Mahfudz Md • Peneliti dari <i>The Habibie Center</i>, Vidya Hutagulung

	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi sangat penting karena sejumlah WNI terpencar di sejumlah Negara. • Data CIA menyebutkan total WNI yang bergabung dengan ISIS sebanyak 689 orang termasuk anak-anak dan perempuan. • Jika anak-anak mantan ISIS dipulangkan, mereka akan mendapatkan pembinaan kontra-radikalisasi terlebih dahulu • Anak-anak dibawah 10 tahun tidak mendapatkan program deradikalisasi karena masih belum terpapar ideologi radikal • Anak-anak merupakan korban dari ideologi orang tuanya. • Anak-anak yang lahir dari WNI status kewarganegaraannya tetap WNI
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak yang dipulangkan harus mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum dibaurkan ke msasyarakat untuk membersihkan paham yang keliru.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data eks ISIS oleh pemerintah
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Staff Keprisedenan, Moeldoko • Menkopolhukam, Mahfudz Md

		<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti dari <i>The Habibie Center</i>, Vidya Hutagulung
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah akan memulangkan anak-anak eks ISIS
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah akan bekerjasama dengan negara lain melalui BNPT • Pemerintah akan lakukan program kontra-radikalisasi bagi anak-anak eks ISIS
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan berita merupakan langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dengan melakukan verifikasi dan membuat program kontra-radikalisasi
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto : kamp pengungsian di Al-Hawl Suriah Mei 2019. • Asas <i>Ius Sanguinis</i> • Grafik WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara • Grafik tentang motivasi hijrah, modus perjalanan ke Suriah dan iming-iming oleh ISIS.

a. Struktur Sintaksis

Judul pada artikel ini memberikan gambaran bahwa pemerintah melakukan verifikasi data terkait dengan eks ISIS yang berada di kamp pengungsian maupun tahanan di wilayah eks ISIS. Lead yang ditampilkan berupa kebijakan pemerintah yang akan memulangkan anak-anak eks ISIS asal Indonesia ke Tanah Air dan

rencanya mereka akan mendapatkan program kontra-radikalisasi dari pemerintah. Latar informasi merupakan hasil dari keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS, namun pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak mereka melalui verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat tiga kutipan sumber utama dari artikel ini. Pertama, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, ia menyampaikan ada kemungkinan pemerintah akan memulangkan anak-anak eks ISIS yang masih dibawah umur dan yatim piatu. Untuk menemukan mereka, pemerintah akan melakukan verifikasi terlebih dahulu karena posisi warga negara Indonesia banyak terpencar di berbagai pengungsian di sejumlah negara. Koran Tempo menampilkan jumlah WNI secara keseluruhan yang bergabung dengan ISIS mencapai 689 termasuk dan anak-anak yang tersebar di sejumlah negara, seperti Filipina, Afganistan, Turki dan Pakistan.

Kedua, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Mahfudz Md, menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan pencarian terkait dengan keberadaan anak-anak eks ISIS namun belum membuahkan hasil. Namun, pemerintah sudah memiliki beberapa nama yang didapatkan dari pemerintah Turki. Jika anak-anak eks ISIS dipulangkan maka pemerintah akan mewajibkan mereka untuk mengikuti program kontra-radikalisasi yang diadakan oleh pemerintah. Menurut Mahfudz Anak-anak dibawah 10 tahun tidak mendapatkan program deradikalisasi karena masih belum terpapar ideologi radikal.

Ketiga, Peneliti dari The Habibie Center, Vidya Hutagulung yang mendukung keputusan pemerintah. Menurutnya, negara perlu hadir untuk melindungi anak-

anak eks ISIS. meskipun mereka dilahirkan di Suriah namun asas kewarganegaraan Indonesia mengacu pada asas *ius sanguinis* atau *law by blood* yaitu berdasarkan garis keturunan. Anak-anak eks ISIS merupakan korban ideologi radikal, sehingga pemerintah perlu untuk membina mereka kembali. Dibagian penutup artikel ini menampilkan pernyataan Vidya yang menyatakan anak-anak yang dipulangkan harus mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum dibaurkan ke masyarakat untuk membersihkan paham yang keliru.

b. Struktur Skrip

Artikel ini memiliki struktur skrip yang lengkap. Pada unsur *who* Koran Tempo menampilkan tiga narasumber utama yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kebijakan pemerintah. Pertama, Kepala Staff Keprisedenan, Moeldoko, kedua, Menkopolhukam, Mahfudz Md dan ketiga, Peneliti dari *The Habibie Center*, Vidya Hutagulung. Ketiganya memiliki pandangan yang sama terkait dengan kebijakan verifikasi data eks ISIS dan memulangkan anak-anak eks ISIS ke Tanah Air. Pada unsur *why* artikel ini menjelaskan mengenai verifikasi yang dilakukan untuk mendata agar dapat memulangkan anak-anak eks ISIS. Sedangkan pada unsur *how*, pemerintah akan bekerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan data anak-anak eks ISIS yang tersebar di beberapa negara. selain itu, pemerintah juga akan lakukan program kontra-radikalisasi bagi anak-anak eks ISIS setelah dipulangkan ke Tanah Air.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini ingin menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsinya dalam melindungi warga negaranya melalui verifikasi data yang dilakukan dan rencana untuk memulangkan anak-anak eks ISIS ke Indonesia. Meskipun pemerintah menolak untuk memulangkan eks ISIS kembali ke tanah air. Koran Tempo ingin menunjukkan kepedulian pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah yang dirasa tidak humanis oleh sebagian masyarakat yang mendukung untuk memulangkan eks ISIS, yaitu berupa jalan tengah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS. Hal ini dapat dibuktikan dengan usaha pemerintah yang serius melakukan pendataan dari berbagai kamp-kamp pengungsian yang berada di berbagai negara terutama anak-anak. Selain itu, pemerintah juga memikirkan rencana untuk melakukan program kontra-deradikalisasi yang akan diikuti oleh anak-anak eks ISIS jika sudah dipulangkan ke Indonesia. Secara implisit, Koran Tempo mendukung pernyataan pemerintah yang akan memulangkan anak-anak eks ISIS ke Indonesia.

d. Struktur Retoris

Struktur retorik yang ditampilkan oleh Koran Tempo dalam artikel ini berupa grafik dibagian akhir artikel yang menjelaskan tentang jumlah WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara. Grafik ini juga memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan warga negara yang tergiur untuk bergabung dengan ISIS. Pertama berupa motivasi hijrah yang tersidiri dari keinginan untuk hidup dibawah naungan khilafah, pemahaman *nubuat akhir zaman* bahwa perang di Suriah adalah awal dari al-malhamah al-kubra atau peperangan akhir zaman dan membela muslim Sunni

dari represi rezim Bashar Al-Assad. Kedua, modus WNI berangkat ke Suriah berupa, Umrah, plesir ke Turki, naik Haji, wisata religi dan studi luar negeri. Ketiga, iming-iming ISIS berupa kehidupan yang adil, pendidikan gratis, kesehatan gratis, uang melimpah dan mati *syahid*. Secara eksplisit, Koran Tempo menunjukkan berbagai alasan warga negara yang tergiur bergabung dengan ISIS kepada publik yang memiliki berbagai pilihan untuk menjadi anggota ISIS, sehingga pemerintah tidak mengeneralkan mereka sebagai kelompok teror yang mengancam keamanan negara.

3.3.5 Teks 5 : Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS

Pemerintah berencana akan membekukan paspor bagi WNI yang terlibat sebagai teroris lintas batas, termasuk eks ISIS. Hal ini bertujuan agar para eks ISIS atau terduga teroris lainnya tidak dapat kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal dan dapat mengancam keamanan negara.

Tabel 3.14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Dari 689 WNI eks ISIS di luar negeri, 288 terkonfirmasi nama dan nomor paspornya
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan penolakan pemulangan eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz Md, Menkopolhukam • Joko Widodo, Presiden Indonesia

		<ul style="list-style-type: none"> • Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah akan memblokir semua paspor milik WNI yang diduga bergabung dengan FTF • Pemerintah memastikan tidak akan memulangkan eks ISIS karena menjadi ancaman bagi Indonesia • Pemerintah membuat satgas yang dikepalai oleh Kepala BNPT untuk melakukan verifikasi WNI eks ISIS • Validasi digunakan untuk menyaring orang terlibat langsung dengan ISIS dan mana yang tidak sehingga bisa dipulangkan • Jika ada yang dapat membuktikan tidak masuk dalam kategori FTF maka pemerintah mempersilahkan untuk pulang ke Indonesia • Pemerintah tidak bisa melarang warga negaranya untuk kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum internasional.
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa kewarganegaraan para WNI eks ISIS akan kehilangan hak-hak dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan atau hak-hak lainnya.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah membekukan paspor WNI yang terlibat dengan ISIS

	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Mahfudz Md, Menkopolhukam
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menolak memulangkan eks ISIS ke Indonesia
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melakukan verifikasi terkait dengan WNI yang terindikasi menjadi FTF dan akan membekukan paspor agar tidak dapat kembali ke Tanah Air.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Paragraf pertama merupakan pernyataan pemerintah akan membekukan paspor bagi WNI yang terlibat FTF. • Paragraf selanjutnya merupakan lanjutan pemerintah yang akan membekukan paspor dengan cara memverifikasi data yang telah ada. • Paragraf terakhir berupa tanggapan dari Amnesty Internasional yang mengkritik pemerintah tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar warga negara.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto : WNI eks ISIS (perempuan) di kamp Al-Hawl • Grafik tentang jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok teroris lintas negara

a. Struktur Sintaksis

Judul pada artikel ini menggambarkan bahwa pemerintah secara tegas akan membekukan paspor WNI yang terlibat dalam jaringan ISIS atau FTF setelah keputusan pemerintah untuk menolak memulangkan eks ISIS ke tanah air. Lead yang ditampilkan berupa informasi tambahan bahwa waat ini pemerintah telah berhasil melakukan verifikasi dari jumlah eks ISIS sebanyak 228 orang dari total 689 orang yang tersebar di sejumlah negara. Latar informasi merupakan rencana lanjutan setelah pemerintah secara resmi mengumumkan untuk menolak memulangkan eks ISIS yaitu membekukan paspor WNI yang terlibat dengan ISIS. Membekekukan paspor sama saja dengan mencabut status kewarganegaraan.

Sumber kutipan yang ditampilkan dalam artikel ini merupakan pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfudz Md dan dilengkapi dengan kutipan dari Presiden Joko Widodo. Selain rencana akan membekukan paspor, Mahfudz juga akan melakukan pencekalan bagi WNI eks ISIS yang secara ilegal masuk ke Indonesia. Sebelumnya pemerintah telah memiliki daftar nama anggota eks ISIS yang telah berhasil di verifikasi oleh pemerintah melalui data yang dihimpun dari CIA dan BIN. Dengan adanya verifikasi tersebut, pemerintah akan mengetahui profil eks ISIS yang dapat memberikan gambaran apakah mereka semua terlibat dalam kelompok teror atau menjadi kombatan atau tidak terlibat sama sekali. Mhfudz mengatakan jika ada yang merasa tidak menjadi FTF maka pemerintah dengan sukarela akan menerima mereka kembali ke Indonesia. Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan, rencanya pemerintah

akan memulangkan anak-anak eks ISIS yang saat ini tertahan di kamp-kamp pengungsian untuk dibawa kembali ke tanah air.

Kutipan selanjutnya merupakan pernyataan dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya pemerintah tidak boleh melarang warga negaranya untuk kembali ke negara asalnya. Dibagian penutup artikel ini menyebutkan bahwa tanpa kewarganegaraan para WNI eks ISIS akan kehilangan hak-hak dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan atau hak-hak lainnya.

b. Struktur Skrip

Artikel ini memiliki struktur skrip yang lengkap berupa 5W dan 1 H. Pada unsur *who* Koran Tempo menampilkan satu narasumber utama yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yaitu Menkopolkam, Mahfudz Md. Pada unsur *why* artikel ini menjelaskan mengapa pemerintah membekukan paspor eks ISIS asal Indonesia, hal ini berkaitan dengan sikap pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS ke tanah air. Sedangkan pada unsur *how*, sebelum membekukan paspor, pemerintah akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang terindikasi menjadi FTF dan akan dibekukan paspornya agar tidak dapat kembali ke Tanah Air, sedangkan jika tidak terbukti menjadi FTF pemerintah dengan sukarela akan memulangkan.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini memiliki dua tema yang saling berlawanan. Pertama, Koran Tempo menunjukkan bahwa pemerintah akan membekukan paspor bagi eks

ISIS asal Indonesia setelah pemerintah resmi menolak untuk memulangkan mereka. Pembekukan paspor dinilai pemerintah sangat penting untuk menghindari para eks ISIS yang akan kembali ke Indonesia secara ilegal. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap seluruh eks ISIS sebagai FTF atau teroris lintas batas. Meskipun pemerintah berencana untuk membekukan paspor, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan verifikasi untuk memetakan profil warga negara yang telah bergabung dengan ISIS. pendataan melalui verifikasi dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi kombatan aktif dan siapa saja yang bukan, sehingga pemerintah memberi kelonggaran bagi siapa saja yang tidak terbukti menjadi FTF untuk diizinkan pulang ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memulangkan anak-anak eks ISIS ke Indonesia dibawah umur 10 tahun.

Kedua, meskipun pemerintah memberikan kelonggaran untuk memulangkan eks ISIS dengan syarat tertentu, menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, pemerintah tidak bisa melarang warga negaranya untuk kembali ke negaranya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional. Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh berbagai negara dunia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi asasi yang harus dijamin, termasuk hak kewarganegaraan.

Pernyataan yang memiliki perbedaan sudut pandang ditampilkan oleh Koran Tempo sebagai perbandingan bahwa menurut hukum internasional eks ISIS dapat dipulangkan ke negaranya, penolakan pemulangan tentu berkaitan dengan kebijakan dari setiap negara. secara implisit, Tempo ingin menunjukkan bahwa sebenarnya eks ISIS memiliki peluang untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya.

d. Struktur Retoris

Struktur Retoris yang ditampilkan dalam artikel ini berupa infografik yang ditampilkan setelah artikel. Data tersebut menampilkan tentang berapa jumlah eks ISIS yang berada di kamp-kamp pengungsian. Sebanyak 689 orang WNI teridentifikasi bergabung dengan ISIS, identitas yang teridentifikasi sebanyak 228 dan yang belum teridentifikasi sebanyak 401 orang yang berada di lokasi sebaran di sejumlah negara, Turki, Afghanistan dan Suriah. Tempo memberikan informasi secara detail terkait dengan jumlah pengungsi yang berada di kamp Al-Hawl sebanyak 200 orang terdiri dari wanita dan anak-anak dan Twanan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebanyak 300 orang semuanya merupakan laki-laki. Tempo juga memberikan detail daftar WNI eks ISIS yang berada di kamp Al-Hawal, tercatat sebanyak 6 orang wanita yang telah teridentifikasi menjadi pengungsi di Suriah.

3.3.6 Teks 6 : Memulangkan Anak-Anak ISIS

Artikel ini merupakan tajuk rencana yang ditulis oleh editorial Koran Tempo yang memberikan kritikan kepada pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS. Kritikan tersebut berupa generalisasi eks ISIS sebagai kelompok teroris lintas batas yang memiliki kekuatan untuk mengancam keamanan. Koran Tempo membingkai eks ISIS dengan beberapa kelompok, dijelaskan dalam artikel ini definisi tentang kombatan dan non-kombatan.

Tabel 3.15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Memulangkan Anak-Anak ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tak perlu tergesa-gesa menerima kembali warga negara Indonesia di Timur Tengah, termasuk anak-anak mereka, yang menjadi simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah yang akan mengkaji memulangkan anak-anak eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Membedakan antara kombatan dan non kombatan secara spesifik. <ul style="list-style-type: none"> - Kombatan : kelompok teror - Non-kombatan : bukan petarung, seperti anak-anak dan perempuan
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka berhak mendapat kesempatan untuk kembali hidup normal dan memiliki masa depan yang baik.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulangan Eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Editorial Koran Tempo
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Memulangkan anak-anak eks ISIS
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus tegas untuk menjaga

		keamanan nasional, tetapi jangan mengabaikan tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang telantar di Suriah
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan merupakan kritik terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak memulangkan eks ISIS tanpa melakukan verifikasi
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan definisi untuk membedakan kombatan dan non-kombatan sehingga terlihat siapa saja yang berhak untuk dipulangkan atau tidak.

a. Struktur Sintaksis

Judul pada artikel ini memberikan gambaran tentang upaya untuk memulangkan anak-anak eks ISIS. Lead dalam artikel ini juga memberikan narasi yang sama namun lebih spesifik, bahwa pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk memulangkan anak-anak tersebut sebelum memiliki program khusus untuk menangani mereka. Latar informasi dari artikel ini merupakan tanggapan dari keputusan resmi pemerintah Indonesia yang tidak akan memulangkan eks ISIS ke Indonesia, diketahui sebanyak 689 orang termasuk anak-anak dan perempuan.

Artikel ini merupakan tajuk dari editorial *Koran Tempo* yang ditulis oleh pihak redaksi, sehingga tidak memiliki kutipan sumber. Opini yang ditampilkan dalam artikel ini, menonjolkan tentang skenario yang diberikan kepada pemerintah melalui redaksi berupa kebijakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS. Opini redaksi dalam artikel ini memberikan pemahaman dan pengertian yang diangkat oleh Koran Tempo tentang definisi dari kombatan dan non-kombatan dalam menyikapi eks ISIS. Artikel ini menjelaskan Kombatan sebagai kelompok teror yang menjadi garda utama dalam perjuangan ISIS seperti pejuang atau petarung ISIS. Sedangkan non-kombatan merupakan mereka yang tidak aktif menjadi petarung ISIS seperti istri pejuang, perempuan dan juga anak-anak.

Atas dasar definisi tersebut, Koran Tempo berusaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa eks ISIS tidak semuanya menjadi kombatan atau kelompok teror yang membahayakan, khususnya anak-anak. Dibagian penutup artikel ini mengutarakan pendapatnya bahwa anak-anak eks ISIS berhak mendapat kesempatan untuk kembali hidup normal dan memiliki masa depan yang baik yang difasilitasi oleh negara.

b. Struktur Skrip

Artikel ini merupakan tajuk editorial dari *Koran Tempo*, sehingga tidak memiliki unsur skrip yang lengkap. Namun terdapat unsur skrip yang ditonjolkan berupa *why* yang lebih tepatnya untuk mengajak masyarakat memahami mengapa pemerintah harus memulangkan anak-anak eks ISIS. komponen pada artikel ini memberikan artikulasi yang cukup jelas pada unsur *how* yaitu kebijakan pemerintah yang tidak memulangkan eks ISIS yang harus memperhatikan sisi kemuaniasian terkait dengan tanggung jawab negara bagi anak-anak terlantar di Suriah.

c. Struktur Tematik

Editorial Koran Tempo yang ditulis dalam tajuk rencana mencerminkan bahwa Tempo memberikan kritik kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang tidak memulangkan eks ISIS. Tempo memberikan argumen seharusnya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut agar tidak mengabaikan tanggung jawab negara. Terdapat dua tema besar yang menjadi konsentrasi Tempo dalam memberikan opininya melalui pembedaan pemulangan eks ISIS.

Pertama. Tempo memberikan pemahaman terkait dengan perbedaan definisi antara kombatan dan non-kombatan atas keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan eks ISIS. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam ISIS. Kelompok pertama merupakan kelompok teror sedangkan yang kedua merupakan kelompok yang tidak melakukan teror atau bahkan menjadi korban dari kelompok pertama. Non-kombatan dikaitkan dengan anak-anak dan perempuan yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan tidak mengeneralisasi mereka sama dengan kelompok pertama yaitu kombatan ISIS. Definisi dalam pembedaan non-kombatan yang ditampilkan oleh Tempo juga berlaku bagi kelompok yang keberangkatannya ke Suriah tidak memiliki motif perang dan rencana mendirikan khalifah, karena diantara mereka ada yang pergi karena iming-iming ekonomi.

Kedua, tanggapan Tempo terkait dengan keputusan pemerintah yang akan mempertimbangkan untuk menerima kembali anak-anak warga Indonesia dibawah 10 tahun. Mereka akan disiapkan program kontraradikalisasi yang berbeda dengan program deradikalisasi bagi orang dewasa. Pertimbangan pemerintah untuk

memulangkan anak-anak dibawah 10 tahun mendapat sorotan yang cukup tajam dari Tempo, hal ini karena pemerintah melakukan pembatasan usia untuk anak-anak yang dipulangkan. Dalam artikel ini disebutkan melalui data UNICEF, terdapat 29 ribu anak-anak berusia dibawah 12 tahun, sekitar 20 ribu berasal dari Iral dan sisanya dari sekitar 60 negara lain termasuk Indonesia. Data tersebut menunjukkan kritik kepada pemerintah bahwa negara tidak boleh menelantarkan anak-anak menjadi pengungsi. Anak-anak tersebut seharusnya diperlakukan sebagai korban bukan pelaku mereka adalah korban ideologi yang salah dari orang tuanya sehingga perlu untuk dilakukan pembinaan.

d. Struktur Retoris

Secara retorik, Tempo ingin memberikan pemahaman kepada khalayak melalui tajuk rencananya bahwa eks ISIS tidak sepenuhnya menjadi Kombatant atau pelakuk teror. Pembingkain tersebut dibentuk karena masyarakat menganggap bahwa semua yang menjadi eks ISIS adalah kelompok teror atau kombatant pejuang ISIS. Padahal diantara jumlah 689 yang diartikan sebagai kombatant tidak semuanya merupakan kelompok teror, karena diantaranya adalah perempuan, anak-anak yang dikategorikan sebagai non-kombatant. Melalui ketagorikasi tersebut, secara implisit Tempo mengkritik kebijakan pemerintah yang mengeneralkan eks ISIS sebagai kombatant, sehingga penolakan pemulangan eks ISIS perlu dikaji ulang agar pemerintah tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai negara.

3.3.7 Teks 7 : Skenario Alternatif Untuk Bekas ISIS

Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh akademisi terkait dengan skenario yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan eks ISIS. Artikel ini secara langsung mengkritik kebijakan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS, karena penolakan tersebut dapat menyebabkan krisis kemanusiaan di Suriah atau negara penanggung. Penulis memberikan saran yang cukup krusial agar dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah.

Tabel 3.16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Skenario Alternatif Untuk Bekas ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah pemulangan (repatriasi) warga negara Indonesia bekas anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak hanya dihadapi oleh pemerintah Indonesia
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana Pemulangan eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Terorisme global harus ditangani secara global, bukan secara sendiri-sendiri oleh negara-negara yang terkena dampak. • Menempuh jalur multilateral dengan melibatkan Irak dan Suriah sebagai negara-negara penanggung.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama, khususnya dengan pemerintah negara-negara penanggung, dalam menangani proses hukum dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar untuk eks ISIS asal Indonesia
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia kiranya perlu bekerja sama, khususnya dengan pemerintah negara-negara penanggung, dalam menangani proses hukum dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, setidaknya selama persoalan ini dalam masa pembahasan dan kajian pemerintah.
Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Skenario pemulangan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrul Muzaqqi, Dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik keputusan penolakan pemulangan eks ISIS oleh Pemerintah
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah atau negara harus ikut bertanggung jawab terkait dengan warga negaranya yang menjadi eks ISIS
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan artikel merupakan kritik penulis kepada pemerintah mengganggu kebijakan

		penolakan pemulangan eks NIIIS yang hanya dilandasi pada sisi hukum saja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kata <i>dimensi moral</i> pada artikel yang digunakan untuk mengkritik keputusan pemerintah.

a. Struktur Sintaksis

Judul dan lead dalam artikel ini merupakan kritikan kepada pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Artikel ini merupakan tulisan lepas dari salah satu akademisi di Indonesia, yaitu Dosen FISIPOL Universitas Airlangga Surabaya. Latar informasi yang menjadi munculnya artikel ini berupaka keputusan resmi terkait dengan pemerintah yang tidak akan memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Berdasarkan pada artikel ini kutipan sumber yang ditampilkan merupakan pernyataan resmi yang dilontarkan oleh Menkopolkam Mahfudz MD yang memberikan informasi terdapat 660 WNI bekas ISIS yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Afganistan, Suriah dan Turki.

Opini yang ditampilkan dalam artikel menjelaskan pemerintah terpaku dengan Pasal 23 UU No 12 tentang Kewarganegaraan. Penulis memberikan penjelasan yang lebih detail bahwa UU tersebut memiliki sembilan poin yang menjelaskan kondisi seseorang kehilangan warga negara, salah satunya yang menjadi problematis utama adalah mengangkat senjata untuk negara asing. Secara sadar eks ISIS melakukan hal tersebut, tapi tidak semua eks ISIS melakukan angkat

senjata karena diantaranya terdapat anak-anak dan perempuan. Sehingga alasan tersebut perlu untuk dikaji ulang agar pemerintah tidak hanya melihat dari sisi hukum formil saja.

Selain itu, penulis memberikan usulan berupa skenario untuk bahwa ISIS merupakan fenomena global, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui kerjasama multilateral dengan berbagai negara. Penolakan pemulangan eks ISIS menjadi problematis dari beberapa negara, banyak negara yang menolak untuk memulangan mereka dan melepas tangan untuk diurus oleh negara yang terdampak seperti Suriah dan Irak. Padahal kedua negara tersebut tengah membangun kembali negaranya ditambah dengan beban untuk mengurus pengungsi dari berbagai negara. sehingga peran Indonesia dalam kamcah global tidak boleh memperhatikan dalam skala rational choice terkait dengan untung dan rugi. Pendapat tersebut merupakan kritik utama yang diutarakan terkait dengan kebijakan pemerintah.

Dibagian penutup, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk melalukan kerjasama dengan berbagai negara untuk menyelesaikan masalah tersebut khususnya untuk negara yang menjadi penanggung dalam menangani proses hukum dan pemenuhan layanan dasar, selama pembahasan ini menjadi kajian pemerintah.

b. Struktur Skrip

Artikel ini merupakan tulisan lepas yang ditulis oleh Fahrul Muzaqqi, Dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya tentang kritik kepada pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Artikel ini tidak memiliki unsur

skrip yang lengkap, unsur skrip hanya ditampilkan pada *why* dan *how*. Pada unsur *why*, skrip yang ditampilkan berupa kritik dengan alasan rasional yang disampaikan. Seperti pernyataan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terkait dengan eks ISIS yang terkatung-katung di kamp pengungsian. Sedangkan dalam unsur *how* penulis memberikan skenario berupa usulan dan saran bagaimana sebaiknya pemerintah menghadapi fenomena tersebut. disebutkan dalam artikel bahwa pemerintah perlu melakukan kerjasama multilateral untuk menghadapi krisis kemanusiaan di Suriah dengan membuat kebijakan yang dilihat dari sisi kemanusiaan.

c. Struktur Tematik

Terdapat dua struktur tema dalam artikel ini. Pertama, penolakan pemulangan eks ISIS yang telah diputuskan oleh pemerintah hanya melihat pada *rational choice* saja, yaitu melihat hitam dan putih dalam sebuah masalah dengan merujuk pada UU Kewarganegaraan. Secara rasional menggunakan dalih UU tersebut untuk mengambil keputusan tidak salah. Namun pemerintah mengabaikan dimensi kemanusiaan dengan men-generalisir semua eks ISIS sebagai kombatan, tanpa terkecuali perempuan dan anak-anak. Menurut penulis, menghilangkan status kewarganegaraan eks ISIS dengan UU tersebut sangat tidak tepat. Karena secara *dejure* dan *defacto* ISIS bukan sebuah negara yang berdaulat. Keberadaannya hanya menjadi kelompok separatis di Timur Tengah yang ingin memiliki negara, namun tidak diakui oleh negara-negara di dunia. Sehingga statusnya menjadi negara utopis yang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara. sedangkan dalam UU Kewarganegaraan menyebutkan "*secara sukarela mengangkat sumpah atau*

*menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut" dan "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden". Hal ini kemudian menjadi problematis karena UU tersebut digunakan untuk menghilangkan status kewarganegaraan, khususnya anak-anak dan perempuan yang belum pasti menjadi kombatan atau pejuang yang mengangkat senjata untuk negara asing sehingga menjadi *stateless*.*

Kedua, fenomena ISIS merupakan fenomena global yang tidak bisa hanya ditangani oleh satu negara saja, tetapi dibutuhkan kerjasama multilateral untuk membahas nasib eks ISIS yang menjadi pengungsi di negara asing seperti Irak dan Suriah. Pemerintah Indonesia dituntut untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara agar tidak terkesan melepas tangan dan menciptakan krisis kemanusiaan di Suriah. Secara implisit, artikel ini mengkritik keputusan pemerintah yang hanya memperlihatkan pada unsur hitam dan putih saja tanpa memikirkan dampak global maupun kemanusiaan.

d. Struktur Retoris

Secara retoris artikel ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang menolak memulangkan eks ISIS dengan tidak memandang sisi kemanusiaan, dan menyebut pemerintah mengesampingkan *dimensi moral*. Dimensi tersebut dijelaskan seharusnya pemerintah tidak secara otomatis mencabut kewarganegaraan eks ISIS tanpa melakukan verifikasi yang jelas, karena tidak semua eks ISIS merupakan kelompok teror, khususnya perempuan dan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Secara eksplisit, artikel ini memandang pemerintah hanya melihat aspek rasional dalam memandang fenomena ISIS

sebagai hitam putih atau baik buruk saja dan tidak mengesampingkan bahwa diantara eks ISIS ada yang menjadi korban ideologi ISIS dan perlu dibina untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

3.3.8 Teks 8 : Penanganan Anak Simpatisan ISIS

Artikel ini mengkritik kebijakan pemerintah yang memulangkan anak-anak eks ISIS dengan batasan usia 10 tahun kebawah dan mengesampingkan usia diatasnya. Menurut penulis anak-anak adalah seorang yang berada dibawah usia 18 tahun seperti yang dirujuk pada UU Perlindungan Anak. Sehingga pemulangan anak-anak eks ISIS yang hanya dibatasi usia harus ditinjau ulang karena negara berkewajiban untuk melindungi anak-anak dari ideologi radikal. Anak-anak yang terlanjur terpapar radikalisme merupakan korban yang harus dibina oleh negara.

Tabel 3.17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Anak Simpatisan ISIS
	Lead	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk memulangkan warga negara Indonesia anak simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berusia di bawah 10 tahun dengan ketentuan khusus (<i>case by case</i>).
	Latar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan keputusan pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS
	Kutipan Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada

	Pernyataan Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Peran anak dalam kelompok ISIS sangat beragam • Pemerintah harus melakukan pemeriksaan awal atau verifikasi untuk melihat perbedaan cara penanganan. • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku lembaga koordinator harus bisa mengkoordinasi pembuatan mekanisme yang tersusun rapi dan berkesinambungan, dari hulu sampai hilir. Pelibatan kementerian/lembaga harus jelas tugasnya • segala program yang dirancang harus memperhatikan pendekatan yang ramah anak dan pemenuhan hak anak
	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Terakhir tapi tak kalah penting adalah komunikasi politik pemerintah harus baik. Stigma dan penolakan di masyarakat akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pejabat publik perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Strategi komunikasi mengenai hal ini pun sudah harus disiapkan karena senyap tidak selalu membawa damai, tapi ramai pun tidak selamanya baik.

Struktur Skrip	What	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik kebijakan pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS
	Where	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
	When	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Februari 2020
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Nurina Vidya Hutagalung, Peneliti pada <i>Countering Terrorism and Capacity Building Program The Habibie Center</i>.
	Why	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah masih menggeneralisir eks ISIS sebagai kelompok teror termasuk anak-anak
	How	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus memulangkan anak-anak eks ISIS yang tidak terbatas oleh usia.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan tulisan merupakan kritik terkait dengan keputusan pemerintah menolak memulangkan eks ISIS dan memberikan saran kepada pemerintah.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asas Ius Sanguinis (law by blood)</i> yang menggambarkan anak-anak yang lahir dari darah WNI adalah WNI • UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

a. Struktur Sintaksis

Judul pada artikel ini memberikan gambaran tentang penanganan anak simpatisan ISIS yang harus dilakukan oleh pemerintah. *Lead* dalam artikel ini menunjukkan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan terkait dengan pemulangan anak-anak simpatisan ISIS dibawah 10 tahun dengan kategori *case by case*. Latar informasi merupakan tanggapan dari keputusan resmi pemerintah yang telah menolak untuk memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Tidak ada kutipan sumber dalam artikel ini, karena berupa tulisan lepas yang ditulis oleh peneliti dari *Countering Terrorism and Capacity Building Program The Habibie Center*. Secara sintaksis, artikel ini memberikan apresiasi sekaligus kritikan kepada pemerintah tentang keputusan tersebut.

Artikel ini menyoroti tentang peran anak dalam kelompok ISIS yang cukup beragam, tidak semua anak-anak pernah dilatih militer untuk menjadi pejuang, sehingga keputusan pemerintah untuk memulangkan eks ISIS dengan batasan umur 10 tahun kebawah sangat tidak relevan. Hal ini dikarenakan dalam UU Perlindungan Anak mencatatat usia dibawah 18 tahun masih dianggap anak-anak.

Selanjutnya, Pemerintah harus melakukan pemeriksaan awal atau verifikasi untuk melihat perbedaan cara penanganan terkair dengan program deradikalisasi untuk anak-anak simpatisan ISIS. Pemerintah juga harus menetapkan apakah penanganan terhadap mereka akan dilakukan dengan pendekatan litigasi atau non-litigasi. Penanganan terkait dengan program deradikalisasi tersebut harus di insiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku lembaga koordinator yang bisa mengkoordinasi pembuatan mekanisme yang tersusun rapi

dan berkesinambungan, dari hulu sampai hilir. Pemerintah juga perlu melibatkan kementerian/lembaga terkait dengan penanganan deradikalisasi anak-anak, selain itu, segala program yang dirancang harus memperhatikan pendekatan yang ramah anak dan pemenuhan hak anak. Dibagian akhir penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi politik yang baik agar stigma dan penolakan di masyarakat tidak semakin besar. Pejabat publik harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan agar anak-anak simpatisan ISIS tidak mendapat perlakuan buruk oleh masyarakat.

b. Struktur Skrip

Artikel ini tidak memiliki struktur unsur skrip yang lengkap, hal ini karena artikel ini merupakan tulisan dari Peneliti pada *Countering Terrorism and Capacity Building Program The Habibie Center*, Nurina Vidya Hutagalung. Unsur skrip yang ditampilkan dalam artikel ini berupa unsur why dan how. Pada unsur why penulis menyeroti terkait dengan keputusan pemerintah yang memulangkan anak-anak dengan batasan umur 10 tahun kebawah. Sedangkan dalam unsur how, penulis memberikan penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani anak-anak simpatisan eks ISIS.

c. Struktur Tematik

Secara tematik, terdapat dua tema besar yang menjadi dasar dari artikel yang ditampilkan dalam Koran Tempo. Pertama, kritik terhadap pemerintah yang memberikan kebijakan batas usia untuk memulangkan anak-anak simpatisan ISIS dibawah usia 10 tahun. Artikel ini menampilkan berbagai UU dan Hukum secara legal bagi pemerintah untuk memulangkan anak-anak tanpa membatasi umur

sehingga anak-anak tersebut berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan dalam asas beserta UU yang dikutip oleh penulis, anak-anak simpatisan ISIS masih menjadi bagian dari WNI hal ini dikarenakan, Indonesia mengadopsi asas *ius sanguinis* yang menjelaskan bahwa perolehan kewarganegaraan berdasarkan pada keturunan. Secara retorik, anak-anak tersebut memiliki darah keturunan Indonesia sehingga mereka masih memiliki status kewarganegaraan. Status tersebut melekat sampai usia 18 tahun walaupun orang tua mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya. Selain itu, artikel ini juga menampilkan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandung. UU tersebut juga menyebutkan ada 15 kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak dalam situasi darurat dan anak korban jaringan terorisme. Dua kategori tersebut sudah menjadi syarat yang terpenuhi untuk memulangkan mereka, sehingga pemerintah tidak perlu membatasi usia anak-anak yang dipulangkan.

Kedua, stigma yang diperoleh oleh anak-anak simpatisan ISIS mengeneralisasi bahwa semua anak-anak telah terpapar radikalisme. Selain itu, peran pejabat publik yang tidak memiliki komunikasi politik yang kurang tepat dengan memberikan pernyataan bahwa “*mata anak-anak WNI di Suriah tajam-tajam dan seperti mau membunuh*”. Stigma tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh buruk yang diamini oleh masyarakat sehingga akan memunculkan penolakan atas pemulangan anak-anak eks ISIS menjadi semakin lebar. Generalisasi

tersebut akan menciptakan stigma yang semakin pekat dimasyarakat, padahal peran anak-anak dalam ISIS tidak semuanya sama. Dijelaskan dalam artikel ini bahwa peran anak-anak sangat bermacam-macam, ada yang dimanfaatkan sebagai aksi dan juga sebagai pengantin untuk kombatan dewasa (anak perempuan).

Berdasarkan dua tema tersebut, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan terkait dengan pemulangan anak-anak simpatisan ISIS yang dibatasi oleh usia maksimal 10 tahun. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan program deradikalisasi yang ramah terhadap anak-anak agar dapat berjalan dengan efektif. Dan yang menjadi *highlight* atau tugas pemerintah dalam artikel ini yaitu, apabila mereka telah selesai menjalankan semua proses, ke mana mereka akan dikembalikan. Siapkan keluarga dan masyarakat yang akan menerimanya. Sehingga, Pendampingan selama proses reintegrasi tersebut harus terus dilakukan secara ketat.

d. Struktur Retoris

Secara retoris, artikel ini sesuai dengan tema Tempo secara keseluruhan yang membingkai pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Artikel ini menggunakan asas hukum *ius sanguinis* yang dianut oleh Indonesia sebagai tolak ukur bahwa keturunan darah Indonesia masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia, sehingga pemulangan non-kombatan eks ISIS harus dipertimbangkan. Selain itu, fokus artikel ini terletak pada batasan usia anak yang dipulangkan namun tidak sesuai dengan UU Perlindungan anak. Secara eksplisit, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS perlu dikaji

ulang secara komprehensif, karena pemerintah melupakan aspek-aspek hukum yang ada di dalam UU negara.

3.4 Rangkuman Analisis *Framing Koran Tempo*

Dari keseluruhan teks yang dianalisis diatas, dapat dilihat bahwa kedelapan teks tersebut memiliki strategi penulisan yang sama. Berikut akan dipaparkan secara ringkas hasil analisis teks *Koran Tempo* menggunakan Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki :

Tabel 3.18

No	Judul Artikel/Laporan Utama/ Opini	Elemen	Strategi Penulisan
1	Pemerintah Minta Waktu Kajian Pemulangan Mantan Anggota ISIS	Sintaksis	Wawancara dengan narasumber pemerintah yang memiliki kecenderungan enggan memulangkan eks ISIS. wawancara dengan pakar HAM yang meminta pemerintah untuk memetakan profil sebelum mengambil keputusan, agar pemerintah tidak meninggalkan HAM.
		Skrip	Pendapat pemerintah yang meminta waktu untuk membahas pemulangan eks ISIS dengan memetakan profil mereka terlebih dahulu agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat.
		Tematik	(1)Pernyataan pemerintah memakan waktu lebih lama untuk memutuskan keputusan yang dilihat dari berbagai aspek (2) Pernyataan pemerintah yang enggan untuk memulangkan eks ISIS karena dapat mengancam keamanan (3) Saran dari komisi HAM untuk memetakan profil eks ISIS sebelum memutuskan kebijakan
		Retoris	Koran Tempo juga menampilkan grafik alternatif pemulangan tentang beberapa alasan pro dan kontra terkait dengan menolak atau

			mendukung memulangkan eks ISIS ke Indonesia.
2	Dilema Pemulangan Mantan ISIS	Sintaksis	Opini dari pakar radikalisme dan deradikalisasi yang menyatakan kondisi dilematis pemerintah yang harus menjaga keamanan dan tidak boleh menelantarkan warga negaranya
		Skrip	Penekanan pada kematangan program deradikalisasi yang harus diupayakan sebelum mengambil keputusan terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Indonesia
		Tematik	(1) pernyataan pada pemerintah untuk menciptakan program deradikalisasi dan tidak boleh menyamaratakan semua eks ISIS sebagai kombatan (2) Anak-anak dan perempuan harus dipulangkan melalui mekanisme yang ditinjau dari sisi kemanusiaan dan dibina dengan program deradikalisasi (3) Pernyataan tentang pemahaman deradikalisasi yang gagal dalam membedakan antara dimensi kognitif dan perilaku deradikalisasi, apa yang dilakukan pemerintah sekarang bukan deradikalisasi tetapi disagreement
		Retoris	Pemerintah tidak boleh menyamaratakan eks ISIS sebagai kelompok teror karena diantaranya terdapat anak-anak dan perempuan yang harus dipertimbangkan untuk dipulangkan. Secara konseptual, eks anggota ISIS dapat didekonstruksi dan direkonstruksi kembali melalui program deradikalisasi yang benar-benar efektif.
3	Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Warga Indonesia Eks ISIS	Sintaksis	Wawancara dengan Menkopolkam yang memberikan keterangan resmi pemerintah tidak akan memulangkan eks ISIS ke Indonesia karena mereka bagian dari FTF (<i>foreign terrorist fighter</i>)
		Skrip	Penekanan pada aspek menjaga stabilitas keamanan dan melindungi rakyat Indonesia dari serangan teror di masa depan
		Tematik	(1) Eks ISIS merupakan bagian dari FTF dan dapat mengancam keamanan (2) Pemerintah akan memulangkan anak-anak dibawah umur 10 tahun

		Retoris	Penampilan eks ISIS yang telah dipulangkan ke Indonesia menjadi bukti bahwa eks ISIS tidak semuanya merupakan kombatan atau bagian dari FTF.
4	Pemerintah Verifikasi Data Warga Indonesia Eks ISIS	Sintaksis	Wawancara dengan pemerintah dan pakar pencegahan terorisme yang memiliki pandangan yang sama terkait dengan pemulangan anak-anak eks ISIS ke Indonesia dan sama-sama memiliki alasan yang kuat.
		Skrip	Pendapat pemerintah dan pakar pencegahan radikalisis ditempatkan saling melengkapi, saling menanggapi dalam posisi yang setara. Pendapat satu tidak ditempatkan lebih utama, argumentasi yang ditampilkan memiliki alasan yang rasional.
		Tematik	(1) Pernyataan pemerintah yang akan melakukan verifikasi bagi eks ISIS yang tersebar di beberapa negara (2) Pernyataan Anak-anak dibawah 10 tahun tidak mendapatkan program deradikalisis karena masih belum terpapar ideologi radikal (3) Pernyataan Anak-anak merupakan korban dari ideologi orang tuanya. (4) Pernyataan Anak-anak yang lahir dari WNI status kewarganegaraannya tetap WNI
		Retoris	Pemakaian asas <i>ius sanguinis</i> sebagai klaim yuridis tentang gagasan anak-anak eks ISIS yang masih memiliki status WNI
5	Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS	Sintaksis	Wawancara dengan pemerintah yang akan membekukan paspor bagi WNI yang terduga eks ISIS dan bagian dari FTF. Wawancara dengan lembaga independent (NGO) yang menilai kebijakan pemerintah yang membekukan paspor tidak tepat
		Skrip	Pendapat pemerintah dan lembaga independent (NGO) yang setuju maupun tidak setuju pembekukan paspor ditempatkan saling melengkapi, saling menanggapi dalam posisi yang setara. Pendapat satu tidak ditempatkan lebih utama dibandingkan dengan pendapat lain. Argumentasi setuju ataupun tidak setuju sama-sama benar.
		Tematik	(1) Pernyataan Pemerintah akan memblokir semua paspor milik WNI yang diduga

			bergabung dengan FTF (2) Pemerintah melakukan Validasi yang digunakan untuk menyaring orang terlibat langsung dengan ISIS (3) Pernyataan pemerintah yang akan memulangkan eks ISIS jika terbukti tidak menjadi bagian dari FTF (4) Pemerintah tidak bisa melarang warga negaranya untuk kembali ke negaranya tanpa alasan yang dibenarkan hukum internasional
		Retoris	Penggunaan hukum internasional deklarasi HAM sebagai klaim yuridis untuk menguatkan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak kewarganegaraan.
6	Memulangkan Anak-Anak ISIS	Sintaksis	Opini editorial Koran Tempo yang mengkritik pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dan tidak menyamaratakan mereka sebagai kelompok teror.
		Skrip	Penekanan pada aspek hukum internasional bahwa pemerintah tidak menelantarkan anak-anak menjadi pengungsi.
		Tematik	(1)Penjelasan Koran Tempo yang membedakan antara kombatan dan non kombatan secara spesifik (2) kritik kepada pemerintah yang tidak memulangkan eks ISIS tanpa melakukan verifikasi
		Retoris	Pemberian label kombatan dan non-kombatan bagi eks ISIS memberi klaim bahwa eks ISIS tidak sepenuhnya menjadi Kombatan atau pelaku teror.
7	Skenario Alternatif Untuk Bekas ISIS	Sintaksis	Opini dari akademisi yang mengkritik keputusan pemerintah yang tidak bisa mencabut kewarganegaraan eks ISIS.
		Skrip	Penekanan pada UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak menjelaskan seseorang kehilangan status kewarganegaraan karena tindak terorisme.
		Tematik	(1)Pernyataan Pemerintah atau negara harus ikut bertanggung jawab terkait dengan warga negaranya yang menjadi eks ISIS (2) Terorisme global harus ditangani secara global, bukan secara sendiri-sendiri oleh negara-negara yang terkena dampak. (3) Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan negara penanggung dalam menangani

			proses hukum dan memenuhi kebutuhan layanan dasar untuk eks ISIS asal Indonesia
		Retoris	Pemberian label otoritas keilmuan dari akademisi memberi klaim kuat bahwa pemerintah harus mengkaji ulang keputusan tersebut.
8	Penanganan Anak Simpatisan ISIS	Sintaksis	Opini dari pakar pencegahan terorisme yang mengkritik pemerintah memberlakukan kebijakan untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dibawah 10 tahun.
		Skrip	Penekanan aspek legalitas dari UU Perlindungan Anak yang menyebutkan seseorang dibawah usia 18 tahun masih dianggap anak-anak
		Tematik	(1) Peran anak dalam kelompok ISIS sangat beragam (2) segala program deradikalisasi yang dirancang harus memperhatikan pendekatan yang ramah anak dan pemenuhan hak anak (3) anak-anak eks ISIS masih memiliki status kewarganegaraan sebagai WNI ditinjau dari hukum internasional dan UU Perlindungan Anak.
		Retoris	Pemakaian asas <i>ius sanguinis</i> sebagai klaim yuridis tentang gagasan anak-anak eks ISIS yang masih memiliki status WNI dan UU Perlindungan Anak bahwa anak-anak adalah orang yang masih berada dibawah 18 tahun bukan 10 tahun.